



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

TUGAS AKHIR

**KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI
KASUS KESEPAKATAN PERUNDINGAN *INDONESIA-AUSTRALIA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
(IA-CEPA) TAHUN 2010-2018**

Diajukan oleh:

Putri Azaria Matondang

17323046

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**Kerjasama Internasional Indonesia-Australia: Studi Kasus Kesepakatan
Perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*
(IA-CEPA) Tahun 2010-2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Putri Azaria Matondang

17323046

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA-AUSTRALIA:
STUDI KASUS KESEPAKATAN PERUNDINGAN
INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TAHUN 2010-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

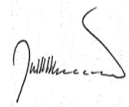
Tanda Tangan

Dewan Penguji:


1. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A



2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.



3. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A.



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Azaria Matondang
No. Mahasiswa : 17323046
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Politik Perdagangan Internasional: Kesepakatan
*Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Tahun
2010-2018*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan adanya tindakan pelanggaran etika akademik dan bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi yang dilakukan oleh orang lain, serta tindakan-tindakan pelanggaran akademik lainnya, yang bertentangan dengan etika yang di junjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021



Putri Azaria Matondang

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'amin

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan juga rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga selesai. Kedua, shawalat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi, yang sudah membantu mendo'akan dan tak lupa untuk memberikan semangat kepada saya, yaitu:

Kedua Orang Tua

Teruntuk Ayah dan Ibu, terima kasih banyak atas segala *support* dan Do'a yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Hanya terima kasih dan Do'a yang dapat saya berikan, semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini, Aamiin.

Kedua Adik Laki-Laki

Terima kasih atas dukungan Do'a dan *support* yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu senantiasa mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, terima kasih sudah menjadi acuan bagi penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tanpa dukungan dan Do'a dari kalian, penulis mungkin tidak dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu, dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.

Keluarga di Yogyakarta

Terima kasih atas segala dukungan, Do'a dan bantuan yang selalu kalian berikan kepada penulis selama melakukan proses penelitian. Tanpa kalian penulis tidak dapat mencapai tahapan saat ini.

HALAMAN MOTTO

مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

“Barang siapa menanam, pasti ia akan memetik”

“Create the highest, grandest vision possible for your life, because you become what you believe” – **Oprah Winfrey**

اجْهَدِ تَكْسَلْ وَلا تَكْ غَافِلًا فَتَنْدَامَ لِمَنْ يَتَكَاسَلُ
وَلَا وَلا الْعُقْبَى

“Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan dan jangan pula lengah karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas”

“The doors will be opened to those who are bold enough to knock”

الْمَجْتَمَعُ الْأُمَّتِي الْأَنْدُونِي

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya motivasi, *support* serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku rektor dari Kampus Tercinta, Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan.
3. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak Bapak, sudah memberikan bimbingan, arahan serta saran selama proses penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi penulis dari awal proses penulisan hingga penulis menyelesaikan tahapan penulisan, tanpa bapak penulis tidak dapat sampai ke tahapan saat

ini. Mohon maaf Bapak, apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam segala urusannya.

4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A. selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan semangat serta nasehat untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih sudah sabar menghadapi saya. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa sering merepotkan Pak Enggar. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam urusannya.
5. Segenap tim penguji skripsi, Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A. dan Bapak Hasbi Aswar, S.I.P., M.A. yang telah menguji, mengoreksi, mengkritik dan memberikan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat bermakna dan berguna. Semoga senantiasa sehat selalu Bapak.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu akan tetapi hal mengenai kehidupan berhasil penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
7. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam urusan akademik dan perkuliahan. Semoga Mba Diah senantiasa

diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

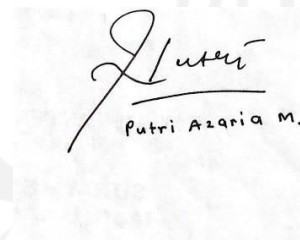
8. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Terima kasih kepada orang tua tercinta, yang tidak ada hentihentinya mengirim Do'a, kerja keras, dukungan dan motivasi agar penulis mencapai tahapan saat ini semoga senantiasa sehat selalu.
10. Kepada kedua adik penulis, Nabel dan Arsyal. Terima kasih atas semua dukungannya. Penulis mendoakan agar kalian senantiasa sukses selalu dalam setiap langkahnya, diberikan keberkahan dan senantiasa sehat selalu.
11. Kepada teman-teman *Slay* yaitu, Dara Sonia F.S, R.A. Dea Agustine dan Nadia Firdaus. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama kuliah di Yogyakarta. Terima kasih sudah selalu siap sedia ketika penulis butuh bantuan. Penulis sangat bersyukur dapat bertemu orang-orang baik seperti kalian, mohon maaf jika penulis ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Semoga senantiasa kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
12. Terima kasih kepada teman-teman Yogyakarta lainnya yang telah menemani penulis selama di masa perkuliahan yaitu, Aji, Sonia, Awin, Ucok, Rafi, Ucil, Iit, Kustya, Inas, Akbar dan Monik. Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua.
13. Kepada kawan-kawan LEM FPSB UII 2018/2019 khususnya

bagian Medin. Terima kasih atas motivasi, dukungan canda dan tawa. Semoga kalian senantiasa sehat selalu.

14. Kepada keluarga HI UII 2017 yang penulis cintai, semoga kita dapat berkumpul kelak dengan kesuksesan masing-masing dan semoga kalian senantiasa sehat selalu.

15. Sekali lagi, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah disebutkan diatas ataupun yang terlewat. Terima kasih sudah memberikan kontribusi dalam proses penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi khalayak ramai yang membutuhkan, Aamiin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021



Putri Azaria M.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Signifikansi	6
1.5. Cakupan Penelitian.....	7
1.6. Tinjauan pustaka	7
1.7. Landasan Konseptual.....	10
1.8. Metode Penelitian.....	15
1.8.1. Jenis Penelitian.....	15
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3. Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4. Proses Penelitian	16

BAB II

SEJARAH KERJA SAMA IA-CEPA	18
2.1. Hubungan Bilateral Indonesia – Australia (IA-CEPA).....	18
2.2. IA-CEPA: Dari Negosiasi Menuju Kesepakatan.....	24
2.3. Kerangka Tujuan dan Manfaat IA-CEPA.....	26
2.4. Hasil Utama dan Peluang IA-CEPA.....	28

2.5. Lini Masa Perjanjian IA-CEPA.....	31
2.5.1. Perkembangan Perundingan IA-CEPA.....	32
2.5.1.1. Tahun 2010-2013: Rezim SBY & Julia Gillard	32
2.5.1.2. Tahun 2013: Rezim SBY & Kevin Rudd.....	35
2.5.1.3. Tahun 2013-2014: Rezim SBY & Tony abbott.....	37
2.5.1.4. Tahun 2014-2015: Rezim Joko Widodo dan Tony Abbott	38
2.5.1.5. Tahun 2016-2018: Rezim Joko Widodo dan Malcolm Turnbull.....	39
BAB III	
APLIKASI KONSEP KERJA SAMA INTERNASIONAL	45
3.1. Meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia-Australia	47
3.2. Meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya hubungan ekonomi luar negeri Indonesia-Australia	56
3.3. Memperkuat hubungan Indonesia-Australia dalam konteks keamanan kawasan melalui identifikasi masalah domestik.....	63
3.4. Melakukan mitigasi terhadap potensi konflik politik Indonesia-Australia	66
BAB IV	
KESIMPULAN	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran dan Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perdagangan Indonesia – Australia sebelum dilaksanakannya perundingan IA-CEPA 2005-2009.....	20
Tabel 2 - Posisi Australia sebagai negara tujuan ekspor Indonesia tahun 2010-2018	21
Tabel 3 - Posisi Australia sebagai negara asal impor Indonesia tahun 2010-2018.....	21
Tabel 4 - Komoditas ekspor Indonesia ke Australia tahun 2010-2018	23
Tabel 5 - Komoditas impor Australia ke Indonesia tahun 2010-2018.....	24
Tabel 6 - Kegiatan perundingan kerja sama bilateral IA-CEPA	44
Tabel 7 - Analisis penerapan konsep Kerja sama Internasional	46
Tabel 8 - Neraca perdagangan Indonesia – Australia tahun 2010-2018	48
Tabel 9 - Perkembangan investasi PMA Australia-Indonesia tahun 2010-2018.....	52
Tabel 10 - Penghapusan tarif IA-CEPA komoditas impor Australia-Indonesia 2018.....	57
Tabel 11 - Penghapusan tarif IA-CEPA komoditas ekspor Indonesia-Australia 2018	58
Tabel 12 - Penghapusan non-tarif melalui kerangka IA-CEPA	59
Tabel 13 - Lini Kesepakatan <i>Code of Conduct</i> Indonesia - Australia	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Lini masa perundingan IA-CEPA tahun 2005-2018... 30



DAFTAR SINGKATAN



AANZFTA	: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement
ACFS	: Australian Centre for Financial Studies
FDI	: Foreign Direct Investment
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
GNP	: Gross National Product
IA-CEPA	: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
IAD	: Indonesia-Australia Dialogue
IA-BPG	: Indonesia-Australia Business Partnership Group
IFIC	: Indonesia Food Innovation Center
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NAFTA	: North American Free Trade Agreement
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAF	: Pre-Agreement Facility
PMA	: Penanaman Modal Asing
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
WTC	: World Trade Center
WTO	: World Trade Organization
VET	: Vocational Education and Training

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerja sama Indonesia-Australia dalam kesepakatan perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018. Indonesia dan Australia merupakan sebuah mitra strategis yang sudah bekerja sama dengan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, hubungan Indonesia-Australia sering kali mengalami ketegangan yang menyebabkan keretakan hubungan bilateral keduanya. Adanya kesadaran bahwa perlunya kedua negara menjalin kerja sama erat dan jangka waktu panjang serta berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. Kedua negara pun menyepakati adanya kerangka kerja sama IA-CEPA, dimana kerja sama IA-CEPA tidak hanya membahas mengenai kerja sama ekonomi. Melainkan kerja sama kedua negara khususnya dibidang politik, keamanan, pendidikan, investasi, kesehatan, pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses-akses terhadap komoditas bahan baku seperti minyak bumi, batu bara, gandum, karet, besi dan baja, binatang ternak dan lain sebagainya. Perundingan IA-CEPA telah dilaksanakan pada tahun 2010 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Julia Gillard, dan kesepakatan perundingan berakhir pada tahun 2018.

Kata Kunci: IA-CEPA, Kerja sama, Perundingan,

This study aims to find out how the process of cooperation between Indonesia and Australia in IA-CEPA negotiation agreement in 2010-2018. Indonesia and Australia are strategic partners who have worked closely with Indonesia after Indonesia's independence. Indonesia-Australia relations often experience tensions that cause a rift in bilateral relations between the two. There is an awareness that the two countries need to establish close and long-term cooperation and make efforts to make improvements in various fields. The two countries also agreed on the existence of an IA-CEPA cooperation framework, where the IA-CEPA cooperation does not only discuss economic cooperation. But the cooperation between the two countries, especially in the fields of politics, security, education, investment, health, tourism, improving the quality of human resources and expanding access to raw material commodities such as petroleum, coal, wheat, rubber, iron and steel, livestock and so forth. The IA-CEPA negotiations were held in 2010 during the administrations of President Susilo Bambang Yudhoyono and PM Julia Gillard, and the negotiation agreement ended in 2018.

Keywords: IA-CEPA, Cooperation, Negotiation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat suatu negara memiliki kebutuhan yang bermacam-macam untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Baik kebutuhan dari segi ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan, keamanan dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan adanya kerja sama. Karena pada dasarnya, makhluk sosial membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sama seperti sebuah negara yang tidak bisa berdiri tanpa negara lain, seperti halnya sebuah negara yang ingin merdeka, tentu tidak dapat terlaksana jika tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Adanya kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari sebuah negara. Maka, muncul sebuah proses hubungan atau kerja sama yang mengakibatkan negara lain. Kerja sama yang dibangun dapat merupakan wujud untuk memperkaya sumber daya alam yang ada, maupun mengisi kekurangan sumber daya yang belum dimiliki. Kerja sama dapat berjalan dengan baik, jika hubungan yang dibangun antar negara juga dapat terjalin dengan baik. Saat ini, kerja sama yang terbentuk antar negara tidak hanya dapat dipecahkan secara individual. Namun, dapat melibatkan aktor lain, baik itu berupa negara, organisasi internasional maupun individu lain yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Indonesia merupakan negara maritim yang letak geografisnya strategis, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia mencapai 267 juta penduduk. Hal tersebut menjadi sebuah acuan bagi negara-negara berbagai belahan dunia untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral maupun multilateral. Bernegosiasi, demi menciptakan peluang pasar atau *common*

interest. Selain menjalin hubungan dengan anggota-anggota negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik yang melibatkan pemerintahan Australia.

Secara hakikat, Indonesia dan Australia merupakan mitra perdagangan yang sudah terjalin sejak lama. Australia merupakan sebuah negara maju yang menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 2.75% per tahun selama 5 tahun terakhir. Meskipun keduanya berbeda dari segi sejarah, ekonomi, sosial maupun budaya. Tidak menutup kemungkinan keduanya untuk saling melengkapi dan kompatibel, sehingga dapat menjalin kerja sama. Maka dari itu, kedua negara sepakat untuk menandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi perdagangan yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) (Ministry of Trade, 2018).

IA-CEPA telah di inisiasi sejak April 2005, merupakan kerja sama turunan dari AANZFTA (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*) dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara (Kementerian Keuangan, 2011). Kedua negara yang tergabung kedalam kerangka AANZFTA tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap hubungan perdagangan Indonesia maupun Australia. Pada tahun 2007, pembahasan kedua negara berlanjut pada tahap *Joint Feasibility Study* serta melibatkan beberapa pihak seperti pemerintahan, swasta maupun akademisi yang bertujuan mengkaji dan menganalisis adanya peluang maupun hambatan – hambatan yang ada. Setelah melewati tahapan pengkajian, Indonesia – Australia dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard sepakat untuk memiliki hubungan negosiasi pada tahun 2010 (Kemendag, Maret, 2019).

Pada pertemuan tersebut, kedua negara membahas sejumlah isu lainnya seperti perdagangan dan investasi, ekonomi digital, pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, penguatan hubungan antar masyarakat serta kerja sama dengan rangka membahas adanya isu terorisme dan memperkuat keamanan maritim untuk mencegah penyerangan kelompok terorisme lewat jalur perairan. Maka dari itu, kedua negara mengadakan adanya kerja sama atau pelatihan aparat keamanan dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah aksi tersebut. Selain itu, kerangka IA-CEPA meliputi perjanjian (FTA) antara Indonesia-Australia yang mencakup isu – isu perdagangan barang, jasa, investasi maupun akses komoditas dengan penurunan 6474 pos tarif hingga 0%, khususnya untuk produk otomotif, tekstil, herbisida dan pestisida, elektronik, permesinan, hasil karet maupun hasil perkebunan seperti kopi, coklat dan sebagainya (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2010).

Melalui kerangka IA-CEPA, kedua negara sepakat bahwa perjanjian tersebut bukan sekedar *free trade agreement* (FTA) biasa. Kemitraan IA-CEPA merupakan kerja sama erat dua negara dengan tujuan melakukan adanya perbaikan-perbaikan diberbagai bidang salah satunya yaitu dengan melakukan adanya mitigasi terkait isu pencari suaka dan aksi penyadapan pihak Australia terhadap pemerintahan Indonesia tahun 2014. Kedua negara memberikan respon positif secara cepat, dalam melakukan upaya perbaikan terhadap kerja sama IA-CEPA yang saat itu mengalami pemberhentian aktivitas sementara. Adanya pembentukan upaya perbaikan kedua negara yaitu dengan melakukan penandatanganan kesepakatan tata perilaku atau

kerja sama keamanan disebut *code of conduct on framework for security* sebagai upaya mengembalikan hubungan proyeksi positif serta *mutual understanding* kedua negara.

Cakupan utama kerangka IA-CEPA yang menjadi acuan terbentuknya negosiasi kedua negara lainnya yaitu. Pertama, momentum. Sebuah negosiasi kedua negara memiliki peran khususnya meningkatkan perekonomian dalam konsep *economic powerhouse*. Kedua yaitu kemitraan, selain membahas mengenai barang, jasa dan investasi, keduanya pun membahas mengenai *Vocational Education Training (VET), Higher Educational and Health Sector*. Terakhir, perjanjian IA-CEPA diharapkan menjadi perjanjian yang dapat memberikan hasil berupa keuntungan yang berimbang dan dapat diimplementasikan dalam kurun waktu yang lama (Kemendag, Oktober, 2019).

Pada tahun 1999, hubungan Indonesia – Australia sempat mengalami guncangan akibat intervensi Australia terhadap referendum Timor-Timur. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kerenggangan dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun seiring berjalannya waktu, kedua negara menyadari bahwa kerja sama merupakan sarana terpenting dalam mendorong produktivitas maupun membangun perekonomian negara. Harapannya melalui kerja sama negosiasi IA-CEPA, kedua negara dapat menjadi bagian dari *global value chain* dan siap menghadapi persaingan global. Kerja sama kemitraan kedua negara memiliki tujuan utama yaitu untuk membentuk *economic powerhouse* atau senilai dengan membangun kerja sama yang menysar pasar negara ketiga dengan menggabungkan keunggulan kedua negara (Mar'atus Sholihah, 2019, p. 5).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, IA-CEPA bukanlah perjanjian yang serupa dengan kerja sama sebelumnya yang dilakukan oleh Indonesia-Australia. Diadakannya kesepakatan IA-CEPA, merupakan sebuah bukti nyata yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia sangat terbuka dan melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor-impor). Cakupan kerangka IA-CEPA lainnya yaitu kedua negara sepakat untuk meningkatkan sektor keamanan, khususnya terhadap kasus *cyber security* yang merupakan salah satu isu penting bagi kedua negara. Pasalnya, penyalahgunaan terhadap *cyber space* saat ini semakin meningkat dan lemahnya terkait regulasi keamanan yang mengatur tindak kejahatan tersebut, membuat kedua negara perlu untuk mengembangkan strategi keamanan siber yang efektif dan mempunyai daya tangkal tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi tonggak sejarah baru bagi kerja sama Indonesia-Australia. Dimana kerangka kerja sama IA-CEPA memiliki cakupan pembahasan yang luas yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan wilayah regional bagi kedua negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian yaitu: Bagaimana proses kerja sama antara Indonesia-Australia dalam hal perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong pemerintah Indonesia-Australia memutuskan untuk pada akhirnya menyepakati perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018.
2. Memetakan strategi/tujuan pemerintah Indonesia-Australia terhadap perundingan IA-CEPA.
3. Mendeskripsikan kebijakan ekonomi Indonesia dan Australia dalam perundingan IA-CEPA.

1.4. Signifikansi

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

Riset ini akan membahas serta menganalisis mengenai hal-hal yang relevan terhadap *issue* yang terjadi di dalam Hubungan Internasional yaitu hubungan bilateral antara Indonesia–Australia yang terjalin dalam sebuah perjanjian bernama IA-CEPA. Keduanya merupakan dua negara yang memiliki lokasi geografis berdekatan. Namun, mengingat hubungan antara Indonesia dan Australia tidak begitu harmonis beberapa tahun yang lalu, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait masa perundingan perjanjian IA-CEPA. Adapun yang menarik dari pembahasan disini adalah, penulis akan mencoba meneliti bagaimana proses kerja sama Indonesia-Australia khususnya dalam perundingan IA-CEPA pada tahun 2010-2018.

1.5. Cakupan Penelitian

Adapun cakupan penelitian ini adalah:

Dalam riset ini penulis memfokuskan terhadap politik perdagangan bilateral kedua negara terhadap studi kasus perundingan IA-CEPA pada tahun 2010-2018. Penulis akan menganalisis awal mula dibentuknya perundingan kedua negara pada tahun 2010, fase-fase yang terjadi semasa perundingan berlangsung hingga berakhirnya masa perundingan kedua negara pada tahun 2018. Selain itu, dalam riset ini penulis akan meneliti lebih jauh seperti apa strategi/tujuan kedua negara semasa perundingan tersebut berlangsung. Adanya aktivitas diplomasi yang terjadi antar kedua negara merupakan salah satu diplomasi terpanjang dalam sejarah Indonesia maupun Australia. Hal tersebut merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, karena disamping wilayah geografis yang saling berdekatan, hubungan kedua negara sering kali mengalami pasang-surut tanpa disadari.

1.6. Tinjauan pustaka

Karena fokus pembahasan dalam riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kerja sama Indonesia-Australia dalam perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018. Penulis akan mencoba menggunakan beberapa tulisan mengenai kelebihan dan kekurangan perjanjian IA-CEPA serta peluang yang didapatkan khususnya bagi kesejahteraan kedua negara, ada beberapa tulisan yang memiliki ketertarikan serupa dengan penelitian yang peneliti telaah. Menurut Jurnal "*Australian Indonesian Relations Since 1945, The Garuda and The Kangaroo*" yang dikemukakan oleh Vinensio M.A.Dugis. Mengatakan bahwa, Indonesia-Australia memiliki sejarah

hubungan bilateral yang dimulai semenjak tahun 1945. Hubungan keduanya senantiasa diwarnai grafik naik dan turun, dimana hubungan keduanya begitu dekat, hangat dan stabil, namun terdapat momen hubungan kedua negara diselimuti dengan ketegangan dan perselisihan.

Salah satu isu yang menyelimuti kedua negara yaitu ketika terkuaknya skandal penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh mata-mata Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Catley, 1998). Adanya desakan permintaan maaf pun tak dihirau oleh pihak Australia dan mengakibatkan Indonesia memulangkan sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia pada tanggal 19 November 2013. Pemulangan tersebut sebagai bentuk protes keras yang dilayangkan Indonesia terhadap Australia. Melihat besarnya potensi hubungan kerja sama diberbagai bidang serta kondisi ekonomi kedua negara yang mengalami transformasi ekonomi secara signifikan. Keduanya pun memilih untuk tetap menjalin hubungan bilateral demi memenuhi kepentingan masing – masing negara.

Dalam jurnal *“The Changing Architecture of The Asia – Pacific Trading System: Implications for the Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Mengatakan bahwa, terjadinya kemajuan didalam agenda reformasi ekonomi APEC dan ASEAN, sementara WTO mengalami kemacetan dikarenakan terdapat sengketa yang terjadi antar anggota negara maju dan berkembang. Maka, dibentuklah sebuah perjanjian kemitraan ekonomi IA-CEPA sebagai bentuk kerja sama khususnya dibidang ekonomi yang memiliki agenda = untuk mengatur kebijakan ekonomi seperti disektor jasa, pendidikan, investasi maupun pertukaran informasi (Perth USAsia Centre, June, 2016, p. 5).

Pada penelitian yang berjudul “Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia” mengatakan bahwa, selain menjadi salah satu anggota ASEAN. Secara geografis sumber daya alam Indonesia dan Australia memiliki peran penting di perdagangan global. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-11 sebagai mitra dagang serta menjadi peluang pasar bagi Australia. Sedangkan Australia menjadi mitra kerja yang menempati urutan ke-8 bagi Indonesia. Hubungan kerja sama kedua negara menjadi *strategic partner*, dimana Australia merupakan peluang pasar baru bagi Indonesia (Yeti Andriani dan Andre, Mei, 2017, p. 80).

Perjanjian kemitraan ekonomi mengarah terhadap perjanjian bebas yang berbasis FTA (*free trade area*) dengan tujuan memperkuat maupun memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Perjanjian IA-CEPA menjadi suatu kesempatan untuk menciptakan gerakan perubahan dalam hubungan Indonesia-Australia menuju tahapan kerja sama dan hubungan baik yang sebelumnya sempat mengalami kerenggangan. Menurut jurnal diatas perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Australia memiliki tiga tujuan rangkaian kegiatan yaitu. Pertama, perdagangan. Kedua, penanaman modal atau investasi. Ketiga, kerja sama yang mengutamakan pembangunan atau *capacity building* di sektor yang telah disetujui khususnya dibidang agrarian, pengembangan jasa, pertambangan serta perekonomian hijau (Yeti Andriani dan Andre, Mei, 2017).

Kerja sama dua negara dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Cristopher Dent dalam tulisannya yang berjudul “*Networking the Region? The Emergence and Impact of Asia – Pacific Bilateral Trade Agreement Projects*”

mengatakan bahwa manfaat dari hasil kerja sama hubungan bilateral perdagangan bebas yang terjadi dapat menciptakan suatu perubahan besar dibidang ekonomi khususnya diwilayah Asia Pasifik (Christopher, 2003, p. 28). Kerja sama bilateral yang terjalin dapat meluas menjadi kerja sama ketingkat multi-level dan membentuk sebuah kelompok sub-regional atau tepatnya dapat memiliki suatu ikatan kerja sama antara negara-negara dalam suatu kepentingan. Indonesia sendiri memiliki kerja sama dengan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan ASEAN.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bertujuan untuk menganalisis mengenai mengapa pada akhirnya Indonesia menyepakati perundingan IA-CEPA. Dengan melihat letak geografis Australia yang berbatasan langsung dengan wilayah bagian selatan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa, perjanjian IA-CEPA bukan sekedar hubungan singkat semata, melainkan telah diperkirakan akan mencapai titik berkelanjutan yang dapat mempengaruhi perekonomian kedua negara.

1.7. Landasan Konseptual

Dalam menjawab rumusan masalah di atas diperlukan analisis berpikir dengan sebuah landasan teori atau konsep. Penulis menggunakan landasan konseptual Kerja sama Internasional menurut Kalevi Jaako Holsti. Menurut Holsti Kerja sama internasional pada hakikatnya dapat dirumuskan sebagai sebuah interaksi antar negara yang saling memiliki keterhubungan satu sama lain. Khususnya dalam memecahkan berbagai persoalan melalui pendekatan-pendekatan

yang telah disepakati. Mengadakan forum untuk membahas maupun merundingkan berbagai kesepakatan, mencari faktor-faktor ataupun fokus permasalahan untuk mendukung pencarian jalan keluar disertai dengan pemahaman bersama (K.J Holsti, 1988, p. 65).

Perjanjian kemitraan IA-CEPA, merupakan hasil dari sebuah hubungan kerja sama internasional yang terjadi antar kedua negara. Kerja sama yang terjadi kebanyakan merupakan interaksi dari sebuah bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu Indonesia dan Australia. Baik pihak yang memiliki kepentingan maupun pihak yang sedang menghadapi permasalahan. Holsti mengatakan bahwa kerja sama didefinisikan sebagai sebuah rangkaian atau hubungan-hubungan yang tidak berdasar terhadap kekerasan, paksaan, dan telah disahkan oleh hukum, seperti halnya PBB atau rekan regional lainnya yang merumuskan kebijakan umum serta koordinasi mengenai kebijakan nasional yang terpisah tetapi tetap dilakukan atas dasar multilateral. Tidak bergantung terhadap pemerintah nasional, selain itu organisasi tersebut menawarkan fasilitas untuk perundingan dan perjanjian yang berlanjut (K.J Holsti, 1988, p. 210).

Dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis, K.J Holsti memberikan definisi kerja sama yaitu. Pertama, terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai serta tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu. Kedua, kebijakan yang diputuskan oleh negara bertujuan untuk membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan maupun nilai-nilainya. Ketiga, aturan resmi maupun tidak resmi mengenai agenda di masa depan dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Keempat, memiliki persetujuan antar

kedua negara dalam rangka memanfaatkan persamaan maupun benturan kepentingan (K.J. Holsti, 1995).

Melihat dari keempat kategori yang dikemukakan oleh Holsti bahwa, perjanjian IA-CEPA merupakan sebuah wadah yang melibatkan kedua negara melakukan hubungan bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Kerja sama Indonesia-Australia sendiri hadir sebagai upaya meningkatkan perekonomian kedua negara. Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Australia dalam kerangka IA-CEPA, dinilai akan membawa kesejahteraan bagi kedua negara, khususnya dalam adanya pengurangan-pengurangan biaya seperti, adanya penghapusan tarif dan non-tarif maupun biaya-biaya produksi lainnya yang harus dikeluarkan.

Terbentuknya kerja sama dinilai akan lebih mengeratkan hubungan antar satu sama lain serta mengarah terhadap perdamaian dunia. Selain itu, adanya hubungan kerja sama yang menimbulkan perspektif baru serta menghindari konflik dimasa lalu bagi Indonesia dan Australia. Kerangka kerja sama internasional memiliki berbagai macam kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh sebuah negara. Munculnya isu utama dari kerja sama internasional, dinilai berasal dari sejauh mana keuntungan yang didapatkan melalui kerja sama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang kompetitif.

Kerja sama internasional sendiri terbentuk akibat kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, maupun keamanan. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya yakni:

- A) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, dimana dengan melakukan hubungan kerja sama, maka suatu negara dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara dalam memproduksi sebuah barang bagi kepentingan negaranya.
- B) Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- C) Memperbaiki hubungan antar negara yang disebabkan oleh masalah-masalah internal yang dapat mengancam keamanan bersama.
- D) Mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang dapat memberi dampak terhadap negara lain (K.J. Holsti, 1995, pp. 362-363).

Kerja sama merupakan sebuah bentuk dari adanya interaksi sosial dalam hubungan internasional untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut tercipta dari adanya penyesuaian – penyesuaian sikap maupun perilaku aktor – aktor dalam bertindak, merespon dan mengantisipasi pilihan – pilihan yang telah disepakati. Menurut konsep Kerja sama Internasional yang dikemukakan oleh Holsti bahwa, interaksi dalam dunia internasional dapat berupa konflik maupun kerja sama. Apabila aktor-aktor tersebut gagal dalam memenuhi kesepakatan, maka akan berujung terhadap konflik. Sebaliknya, jika aktor-aktor yang terhubung berhasil mencapai kesepakatan, maka interaksi yang terjadi menghasilkan suatu bentuk hubungan kerja sama (K.J Holsti, pp. 652-653).

Hubungan bilateral Indonesia-Australia telah terjalin sejak tahun 1945. Namun, pada tahun 1997-1999, terjadi tiga fenomena besar yang menggemparkan dunia internasional yaitu, terjadinya krisis ekonomi pemerintahan Indonesia sekaligus turunnya Presiden Soeharto. Hal tersebut pun berlanjut terhadap krisis di

Timor Leste yang mengakibatkan hubungan bilateral Indonesia – Australia mendingin atau mengalami episode ‘jungkir balik’. Merenggangnya hubungan Indonesia – Australia juga disebabkan oleh adanya kekalahan pemerintahan Keating dan terpilihnya pemerintahan koalisi Howard.

Dalam menganalisis lebih lanjut Konsep Kerja sama Internasional menurut K.J Holsti mengatakan bahwa, walaupun hubungan yang terjalin antara Indonesia-Australia sudah bertahun-tahun lamanya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hubungan kedua negara pernah mengalami beberapa konflik atau memiliki ketidaksepahaman satu sama lain. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti lokasi geografis yang saling berdekatan dan memiliki keberagaman serupa baik dalam hal, bahasa, agama, suku, ras dan budaya. Tidak menutup kemungkinan keduanya untuk kembali membangun hubungan bilateral untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan. Maka, terwujudnya kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam adanya kerangka kerja sama negosiasi IA-CEPA merupakan sebuah bentuk dari adanya kerja sama yang terjadi antara dua aktor negara.

Memperbaiki kembali hubungan dimasa lampau yang sempat mengalami pasang surut, tujuan dilakukannya kerja sama sebagai bentuk perdamaian dan stabilitas keamanan di regional maupun dunia, dapat memperkenalkan kepada dunia internasional hubungan erat serta bersahabat, dapat menetapkan suatu kerangka tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral bagi kawasan, mengintegrasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi dimasa lalu (bila sebelumnya sudah memiliki bentuk kesepakatan) serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua negara (Makmur Supriyatno, 2014, p. 150). Kesepakatan kerja sama harus memiliki tujuan yang jelas agar tercipta kebutuhan

dan kepentingan sebuah negara. Kerja sama antara kedua negara atau lebih sangat rawan apabila tidak memiliki tujuan yang jelas, dimana tindakan tersebut dapat digunakan sebagai bentuk negatif oleh pihak lain.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian dilakukan secara bertahap. Pengumpulan data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis literatur, diskusi maupun observasi. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang mengeksplorasi suatu permasalahan. Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti dapat membangun sebuah gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan (Prof. Dr. Emzir, 2016). Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa suatu isu menggunakan konsep yang relevan. Peneliti juga akan menggunakan metode penelitian eksploratif analitis. Penelitian eksploratif adalah sebuah upaya memecahkan suatu masalah dengan mencari info – info terbaru melalui pernyataan resmi dari pihak – pihak terkait yang menyajikan fakta secara sistematis dan berdasarkan fakta (Moh. Nazir, 2003).

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian Dampak Perjanjian IA-CEPA terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2010-2018, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap perekonomian Indonesia. Subjek yang ditentukan didalam penelitian ini adalah perjanjian IA-CEPA, perjanjian tersebut merupakan aktor dari perjanjian perekonomian yang memiliki dampak bagi Indonesia. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah negara Indonesia, yaitu sebagai sasaran yang diteliti oleh peneliti.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, tujuannya yaitu mengumpulkan informasi – informasi terbaru yang didapat dari dokumen tertulis, baik berupa jurnal, surat kabar, majalah, koran maupun berita – berita yang tersebar di internet. Data yang didapatkan disajikan secara sistematis dan berdasar fakta yang ada. selain itu, peneliti akan menganalisa hubungan sebab akibat melalui beberapa faktor – faktor yang berhubungan dengan permasalahan atau objek penelitian yang akan di teliti

1.8.4. Proses Penelitian

Peneliti mengumpulkan beberapa data-data yang akan dikaji sesuai dengan fokus penelitian. Dimana peneliti memusatkan kajiannya terhadap studi literatur, yaitu studi pengumpulan data dari sejumlah bahan seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel dan sebagainya. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan di analisis

serta ditelaah lebih dalam. Peneliti memusatkan kajiannya pada sejumlah literatur mengenai hubungan negara Indonesia dan Australia. Khususnya mengenai mengapa pada akhirnya Indonesia menyepakati perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018.



BAB II

SEJARAH KERJA SAMA IA-CEPA

2.1. Hubungan Bilateral Indonesia – Australia (IA-CEPA)

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang terdiri dalam dua benua, Asia dan Australia. Secara geografis, kedua negara saling berdekatan satu sama lain. Indonesia merupakan negara yang menjadi bagian dari benua Asia, dikelilingi oleh berbagai pulau dan berdiri sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 04 Februari 2021). Sedangkan, Australia merupakan sebuah benua yang membentuk pulau dan memiliki cakupan wilayah yang luas, terletak diantara Samudra Pasifik, Samudra Hindia maupun daratan Kutub Selatan dan wilayah Asia Tenggara. Walaupun kedua negara memiliki perbedaan mencolok seperti tingkat kemajuan perekonomian dari segi infrastruktur negara dan politik.

Indonesia-Australia sejatinya memiliki kesamaan oleh adanya keberagaman agama, suku, ras, budaya dan lokasi geografis berdekatan yang menjadikan keduanya menjadi mitra kerja sama ekonomi strategis. Hubungan kerja sama Indonesia dan Australia telah terjalin pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada mulanya, fokus kerja sama kedua negara hanya dibidang stabilitas keamanan dengan tujuan menjaga wilayah kawasan. Seiring berjalannya waktu, fokus kerja sama bilateral antara Indonesia-Australia meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk membangun perekonomian sebuah negara, diperlukan adanya kerja sama yang dapat terwujud ketika negara-negara senantiasa memiliki tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya maupun mengisi kekurangan yang belum dimiliki oleh negara lain.

Indonesia-Australia merupakan dua negara yang tidak dapat dipungkiri memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Memiliki kondisi geografis dengan letak berdekatan serta sejarah kedekatan kedua negara di masa lalu. Tidak dapat dipungkiri, hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan sendiri tidak begitu harmonis dan kerap kali mengalami ketegangan. Terjadinya beberapa isu-isu lainnya semakin mengakibatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia memasuki tahapan yang paling dingin, hingga implikasinya mempengaruhi berbagai aspek hubungan. Namun, ditengah kemajuan era globalisasi yang pesat serta lokasi geografis yang berdekatan membuat kedua negara menyadari bahwa perlu untuk melakukan adanya kerja sama dan melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang.

Indonesia dan Australia sendiri telah menjalin berbagai kerja sama internasional, salah satunya adalah kerangka kerja sama IA-CEPA. Dibentuknya kerja sama IA-CEPA merupakan sebuah bentuk integrasi perekonomian Indonesia dan Australia secara bilateral dan regional. Tujuannya untuk membentuk pondasi kerja sama kokoh di berbagai sektor seperti perdagangan, keamanan, kesehatan, pendidikan maupun isu-isu transnasional lainnya yang dapat menciptakan iklim kondusif untuk menunjang pengembangan bisnis dan investasi kedua negara. Indonesia merupakan rekan perdagangan penting bagi Australia dan begitu pun sebaliknya, hal ini menjadikan kedua negara beranggapan bahwa perdagangan memiliki sikap diplomatis, komplementer dan mengikat.

Sebelum adanya kesepakatan IA-CEPA, Indonesia-Australia sendiri telah melakukan kerja sama perdagangan melalui kerangka perjanjian *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)* yang telah

dilaksanakan sejak tahun 2010. Diberlakukannya kerangka kerja sama AANZFTA tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perekonomian kedua negara. Maka, keduanya pun bersepakat untuk melaksanakan kerja sama negosiasi IA-CEPA guna melengkapi kebutuhan dan memanfaatkan momentum untuk meningkatkan perekonomian negara serta berperan dalam *Global Value Chain*. Selain itu, adanya kepentingan Indonesia dalam kerangka IA-CEPA untuk dapat memperbaiki permasalahan neraca perdagangannya dengan Australia dari tahun ke tahun mengalami defisit. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 terhadap neraca perdagangan Indonesia dan Australia sebelum dilaksanakannya perundingan IA-CEPA.

Tabel 1 – Perdagangan Indonesia – Australia sebelum dilaksanakannya perundingan IA-CEPA 2005-2009

*) dalam juta US\$

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	Trend (%)
Total perdagangan	4.794.748	5.757.541	6.398.569	8.108.503	6.700.239	10,65
Migas	1.422.362	1.473.673	1.713.593	2.020.496	1.614.470	5,85
Non migas	3.372.386	4.283.868	4.684.975	6.088.007	5.085.769	12,45
Ekspor	2.227.608	2.771.277	3.394.557	4.110.969	3.264.224	12,28
Migas	1.101.600	1.167.700	1.526.683	2.003.504	1.552.577	13,05
Non migas	1.126.007	1.603.576	1.867.874	2.107.463	1.711.647	11,75
Impor	2.567.140	2.986.264	3.004.012	3.997.543	3.436.015	9,14
Migas	320.761	305.972	186.910	16.991	61.893	-46,11
Non migas	2.246.378	2.680.292	2.817.101	3.980.542	3.374.121	12,85
Neraca perdagangan	-339.532	-214.987	390.545	113.435	-171.790	0,00
Migas	780.838	861.728	1.339.722	1.986.512	1.49.638	23,72
Non migas	-1.120.371	-1.076.716	-949.226	-1.873.076	-1.662.464	0,00

Sumber: (BPS, 2021) Biro Pusat Statistik

Tabel 2 - Posisi Australia sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia tahun 2010-2018

*dalam juta US\$

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Total perdagangan	7.453	10.760	10.203	10.595	8.518	8.469	8.533	8.645
Neraca perdagangan	60.111	405.088	-392	-699	-1.113	-2.051	-3.484	3.005
Ekspor	3.756	5.582	4.905	4.948	3.702	3.208	2.524	2.819
Migas	1.613	2.504	1.547	1.251	707	538	582	656
Non migas	2.142	3.078	3.358	3.696	2.994	2.670	1.941	2.162
Impor	3.696	5.177	5.297	5.647	4.815	5.260	6.008	5.825
Migas	5.845	3	219	156	143	731	964	664
Non migas	3.690	5.174	5.078	5.490	4.672	4.529	5.043	5.160

Sumber: (BPS, 2021)

Tabel 3 - Posisi Australia sebagai negara asal impor Indonesia tahun 2010-2018

*) dalam juta US\$

NO	Negara Tujuan Ekspor	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tiongkok	15.692	22.941	21.659	17.605	15.046	16.790	23.083	27.132
2	AS	14.266	16.459	14.874	16.530	16.240	16.141	17.794	18.439
3	Jepang	25.781	33.714	30.135	23.117	18.020	16.098	17.798	19.465
4	Singapura	13.723	18.443	17.135	16.728	12.632	11.861	12.724	12.915
5	Taiwan	4.837	6.584	6.242	6.425	5.043	3.655	4.229	4.703
6	Malaysia	9.362	10.995	11.278	9.730	7.630	7.069	8.441	9.271
7	Korea Selatan	12.574	16.388	15.049	10.601	7.664	7.008	8.200	9.540
8	Thailand	4.566	5.896	6.635	5.783	5.507	5.594	6.473	6.820
9	Filipina	3.180	3.699	3.707	3.887	3.921	5.270	6.629	6.832
10	Vietnam	1.946	2.354	2.273	2.451	2.740	3.045	3.586	4.581
11	Belanda	3.772	5.132	4.664	4.948	3.442	3.254	4.037	3.896
12	Australia	4.244	5.582	4.905	3.984	3.702	3.208	2.524	2.819

Sumber: (BPS, 2021)

Dapat dilihat dari tabel 2 dan 3 diatas, Australia merupakan mitra kerja sama bidang ekspor ke-12 dan impor ke-8 bagi perdagangan Indonesia. Pada tahun 2010, Australia menjadi negara tujuan ekspor Indonesia dengan nilai sebanyak US\$ 4,2 juta. Di tahun 2011, jumlah perkembangan ekspor Australia dengan tujuan Indonesia mengalami peningkatan mencapai US\$ 5,5 juta dan mengalami

penurunan pada tahun berikutnya dengan total US\$ 4,9 juta. Terjadinya proses ketegangan akibat adanya isu pencari suaka dan aksi penyadapan pihak Australia terhadap Indonesia bermula pada tahun 2013, penurunan terhadap sektor ekspor dengan total US\$ 4,3 juta, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 4,9 juta.

Puncak aktivitas ketegangan Indonesia-Australia pun terjadi di tahun 2014, menyebabkan terjadinya kembali penurunan drastis dan mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia-Australia. Pada tahun ini, sektor ekspor Indonesia ke Australia mencapai total US\$ 3,9 juta. Hal tersebut terjadi dikarenakan, adanya pemberhentian sementara terhadap aktivitas beberapa sektor kerja sama bilateral kedua negara. Selanjutnya tahun 2015-2018, adanya penurunan terhadap sektor ekspor Indonesia ke Australia pun tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015 sendiri, komoditas ekspor menuju Australia mencapai US\$ 3,7 juta dan masih mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menjadi US\$ 3,2 juta dan mencapai US\$ 2,5 juta pada tahun 2017.

Menurut data, terjadinya kenaikan secara perlahan tepatnya di tahun 2018 dan tahun berikutnya mencapai total US\$ 2,8 juta. Perkembangannya tidak terlalu signifikan, namun dapat meningkatkan sektor ekspor bagi Indonesia. Sedangkan pada sektor impor, Australia menjadi negara asal impor ke-8 Indonesia dengan total nilai mencapai US\$ 4,0 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2012, sektor impor Indonesia dari Australia mencapai total US\$ 5,1 juta dan cukup stabil dengan total US\$ 5,0 juta. Di tahun 2014, sektor impor sendiri mengalami peningkatan mencapai US\$ 5,6 juta dan mengalami penurunan di angka US\$ 4,8 juta.

Pada tahun berikutnya, sektor impor kedua negara kembali stabil dengan total US\$ 5,2 juta. Sektor impor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan terbesar dalam sejarah perundingan IA-CEPA tepatnya pada tahun 2017 dengan total US\$ 6,0 juta dan menjadi US\$ 5,8 juta di tahun 2018. Bergabungnya kekuatan ekonomi kedua negara melalui perjanjian kemitraan kerja sama IA-CEPA, dapat membawa dampak besar bagi perekonomian keduanya. Salah satunya, untuk mencegah terjadinya defisit perdagangan terhadap pemerintahan Indonesia. Walaupun perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan bagi Indonesia, namun dapat akan berdampak terhadap peningkatan *Gross National Product* (GNP) perekonomian Indonesia (Danar A, 2019, p. 29). Dibawah ini terdapat tabel 4 dan 5 berisi hasil komoditas ekspor-impor Indonesia dan Australia tahun 2010-2018.

Tabel 4 - Komoditas ekspor Indonesia ke Australia tahun 2010-2018

*) dalam juta US\$

No	Negara Asal Impor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tiongkok	20.424	26.212	29.385	29.849	30.624	29.410	30.800	35.766	45.537
2	Singapura	20.240	25.964	26.087	25.581	25.185	18.022	14.548	16.888	21.439
3	Jepang	16.965	19.436	22.767	19.284	17.007	13.263	12.984	15.240	17.976
4	Thailand	7.470	10.405	11.438	10.703	9.781	8.083	8.666	9.281	10.952
5	AS	9.399	10.813	11.602	9.065	8.170	7.593	7.298	8.121	10.176
6	Malaysia	8.648	10.404	12.243	13.322	10.855	8.530	7.200	8.858	8.603
7	Korea Selatan	7.703	12.999	11.970	11.592	11.847	8.427	6.674	8.122	9.088
8	Australia	4.099	5.177	5.297	5.038	5.647	4.815	5.260	6.008	5.825
9	Vietnam	1.142	2.382	2.595	2.722	3.417	3.161	3.228	3.228	3.794
10	Jerman	3.006	3.393	4.188	4.426	4.091	3.471	3.159	3.538	3.973

Sumber: (Trade Map, 2017)

Tabel 5 – Komoditas impor Australia ke Indonesia tahun 2010-2018

*) dalam juta US\$

No	Produk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Minyak Bumi	652	751	375	213	92	72	92	170	235
2	Besi dan Baja	163	200	276	499	889	900	671	76	135
3	Karet	110	128	142	109	108	95	89	84	83
4	Emas	470	417	804	201	17	26	35	28	19
5	Kayu	173	205	200	188	219	185	180	210	214

Sumber: (Trade Map, 2017)

Selanjutnya, cakupan yang tertuang dalam kerangka IA-CEPA memiliki tiga poin utama bagi kedua negara. Salah satunya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas investasi atau penanaman modal asing guna mendapatkan keuntungan berimbang dan dapat diimplementasikan dalam jangka panjang. Tujuan rinci IA-CEPA lainnya dirumuskan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade Australia of Australia* dimana substansinya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan perdagangan dan investasi, meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, menghapus pembatasan maupun tindakan diskriminatif dalam perdagangan barang dan jasa, menciptakan siklus investasi kompetitif guna meningkatkan berbagai peluang investasi melalui promosi, perlindungan dan fasilitas.

2.2. IA-CEPA: Dari Negosiasi Menuju Kesepakatan

Indonesia dan Australia merupakan mitra kerja sama yang telah melakukan hubungan bilateral sejak lama. Kedua negara beranggapan bahwa menjalin kerja sama antar negara merupakan sebuah kewajiban, keduanya mempercayai bahwa sebuah negara tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa faktor persoalan politik yang mendominasi

hubungan kedua negara, sering kali menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Salah satunya merupakan permasalahan dengan isu terorisme, penyadapan ataupun beberapa hal lainnya yang mengancam kedaulatan Indonesia baik dari segi separatisme lokal maupun tidak adanya keteraturan dalam migrasi penduduk (Missbach, 2017, p. 222).

Demikian, tidak menutup kemungkinan kedua negara untuk menyepakati bahwa penting untuk melakukan kerja sama, khususnya dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, Indonesia dan Australia menyepakati adanya sebuah mitra kerja sama ekonomi komprehensif yang terbentuk dalam kerangka IA-CEPA. Tujuannya untuk meningkatkan kembali hubungan kedua negara, khususnya dibidang kerja sama ekonomi dan keamanan demi memperoleh keuntungan serta manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat beberapa interaksi sosial yang dapat berupa pembentukan aliansi, konflik atau masalah, peperangan, organisasi internasional, serta dapat bersifat kerja sama (Agung Banyu Perwita, 2005, pp. 4-5). Hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia sendiri sering mengalami pasang surut. Pada awalnya, hubungan keduanya berjalan dengan sangat baik, menurut Richard Chauvel dalam makalahnya yang berjudul “Hubungan Bertetangga Dua Negara Demokratis: Indonesia-Australia” berpendapat bahwa Indonesia sendiri mengalami perubahan secara signifikan pasca krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan lemahnya posisi Indonesia di dunia Internasional dan memacu terjadinya keretakan hubungan bilateral Indonesia-Australia (Richard Chauvel, 2005, p. 1).

Pada tahun 2005, Indonesia-Australia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard kembali mendeklarasikan hubungan diplomatik kedua negara, mengingat Indonesia dan Australia memiliki lokasi geografis yang saling berdekatan serta ikatan sejarah dimasa lalu. Keduanya menyepakati untuk mengadakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk membahas kerja sama perekonomian melalui *Joint Declaration Comprehensive Partnership*. Pada 2007, Indonesia dan Australia melanjutkan kembali forum pembahasan, melalui *Joint Feasibility Study* yang melibatkan beberapa pihak dari pemerintahan, akademisi maupun swasta. Selanjutnya pada 2010, Indonesia dan Australia pun bersepakat untuk lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kolaborasi ekonomi dalam kerangka IA-CEPA. Perjanjian tersebut diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard guna membangun kembali hubungan kerja sama serta keamanan strategis.

2.3. Kerangka Tujuan dan Manfaat IA-CEPA

Kerja sama yang tertuang dalam IA-CEPA memiliki landasan utama untuk menciptakan sebuah kerja sama bilateral yang lebih erat antara Indonesia-Australia, khususnya dalam membuka peluang baru dalam ketenagakerjaan, keamanan, pasar global, penyedia jasa maupun investor. Hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang maupun individu terlibat dalam suatu kegiatan seperti pengembangan bisnis maupun pelaku investor yang dapat menyuarakan ataupun berperan dalam memberikan masukan serta beberapa alternatif kepada pihak pemerintah (Kedutaan Besar Australia Indonesia, diakses pada tanggal 6 Januari 2021).

Adapun beberapa hasil dan manfaat utama Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia, antara lain:

- Perjanjian IA-CEPA hadir untuk memudahkan akses terhadap eksportir Australia agar mudah memasuki pasar Indonesia secara signifikan. Ekspor barang Australia yang memasuki pasar Indonesia akan mendapatkan lebih dari 99% bebas bea masuk, begitupun sebaliknya Australia akan menghapus tarif impor dari Indonesia ke Australia.
- Meningkatkan adanya investasi kedua negara agar Indonesia menjadi negara tujuan bagi investor Australia, sebaliknya memudahkan investor Indonesia untuk menanamkan modalnya di Australia.
- Meningkatkan adanya daya saing pekerja-pekerja Indonesia agar berstandar Internasional.
- Adanya perluasan akses pasar serta meningkatkan daya saing dari hasil-hasil produk seperti, perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian dan sebagainya.
- Meningkatkan kerja sama bilateral terkait sektor-sektor keamanan salah satunya yaitu berhubungan dengan pemberantasan terorisme dan penguatan dibidang kerja sama keamanan maritim.
- Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan kedua negara agar senantiasa dapat bersama-sama memaksimalkan perjanjian IA-CEPA dan berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang (Kedutaan Besar Australia Indonesia).

Oleh sebab itu, dengan dibentuknya IA-CEPA kedua negara memandang bahwa kerja sama yang tercipta merupakan sebuah hubungan strategis dalam

memenuhi kepentingan nasional masing-masing, khususnya dalam dimensi keamanan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kerja sama yang terbentuk bukan saja sebagai sebuah FTA semata, sebaliknya kerja sama yang terjalin merupakan sebuah perjanjian kemitraan yang bersifat komprehensif. Kerja sama yang terbentuk dapat berupa perjanjian yang bersifat luas dan diharapkan dapat menjadi memiliki pengaruh besar bagi kesejahteraan kedua negara.

2.4. Hasil Utama dan Peluang IA-CEPA

Pada pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai hasil utama maupun peluang yang terbentuk melalui kerja sama kedua negara. Mengingat dalam perjanjian IA-CEPA tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan individu ataupun pelaku bisnis lainnya. Dalam hubungan perdagangan kedua negara, Australia sendiri menjadikan Indonesia sebagai pasar *meat and dairy product, mineral product, wheat, mineral product, as well services sector*. Pasalnya Indonesia menempati urutan ke 12 besar pasar ekspor bagi Australia sedangkan Australia menjadi urutan ke-8 sebagai ekspor pasar bagi Indonesia (Harry Suetanto, 7 Maret 2011).

Melalui kesepakatan komprehensif IA-CEPA, kedua negara akan menuju terhadap sebuah *economic powerhouse* (kemitraan ekonomi yang menyasar pasar dunia global) guna memudahkan Australia dan Indonesia untuk mendapatkan akses pasar terhadap komoditas bahan baku eksportir seperti, gandum, minyak bumi, batubara, besi dan baja, tanpa adanya hambatan perdagangan baik itu hambatan tarif maupun non-tarif (Databoks, 6 Januari 2021). Jika sebelumnya tarif barang masuk

dari Australia ke Indonesia mencapai 6% jumlahnya, dengan adanya mitra kerja sama IA-CEPA kedua negara bersepakat untuk saling membebaskan tarif dengan total 0% guna memperkuat hubungan ekonomi keduanya dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, dengan meluasnya pasar Indonesia di wilayah Asia Pasifik, tentu akan meningkatkan daya saing baik dari segi tenaga kerja maupun komoditas produk-produk seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan serta dapat memfasilitasi Indonesia untuk menjaga serta meningkatkan standar kualitas agar dapat bersaing dikancah global.

Hasil utama IA-CEPA khususnya bagi Indonesia yaitu, adanya *work and holiday visa* terhadap tenaga kerja Indonesia, individu yang melakukan kegiatan seperti liburan serta adanya dorongan pertukaran budaya dari segi pendidikan. Adanya pemberian kuota sebanyak 4.100 orang dan mengalami kenaikan kuota 5% setiap tahunnya (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2019). Hal tersebut merupakan sebuah bentuk kerja sama erat antara *government to government* (antar Pemerintah Indonesia dan Australia) untuk saling membina hubungan baik dimasa yang datang.

Selain berdampak pada bidang ekonomi, kerangka kerja sama IA-CEPA juga berpengaruh dalam sektor keamanan bagi Indonesia-Australia. Pasalnya kedua negara ingin meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan wilayah regional. Melalui kemitraan komprehensif IA-CEPA, selain Indonesia mendapatkan bentuk peluang besar menjalin mitra kerja sama dengan Australia, disatu sisi, Australia lebih maju dari segi finansial dan teknologi. Adanya kerja sama kedua negara dapat memudahkan Australia untuk mengantisipasi serta

mengetahui informasi mengenai aksi terorisme baik dalam kawasan domestik maupun di wilayah Asia Tenggara.

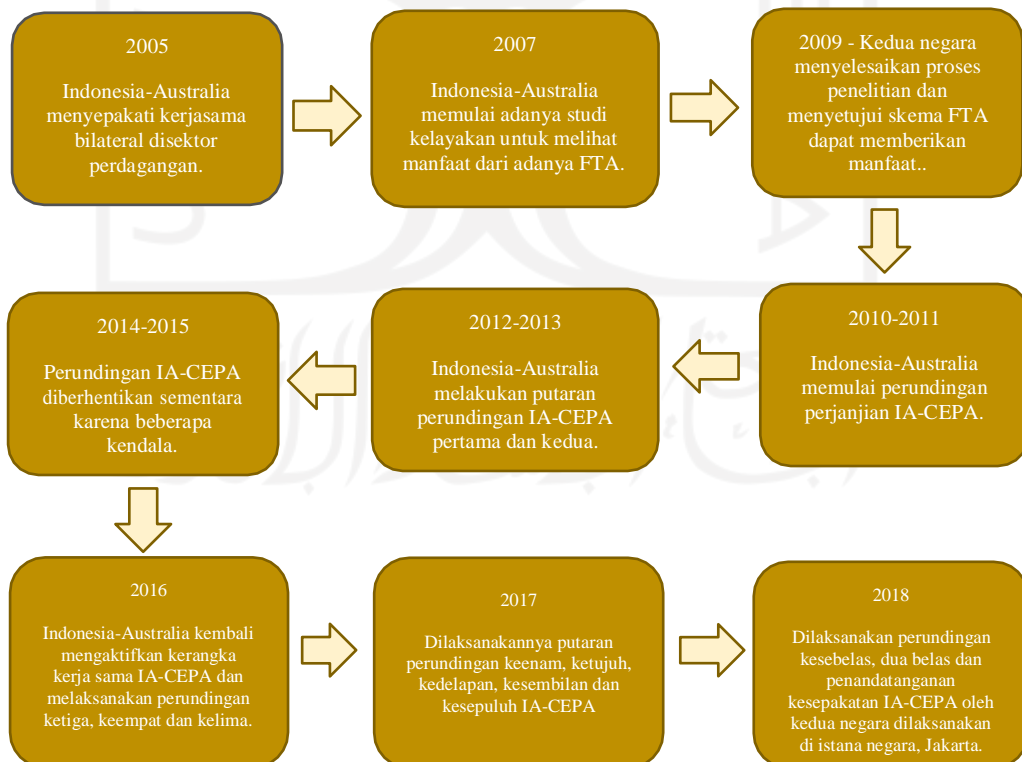
Berdirinya kemitraan komprehensif ekonomi IA-CEPA menjadi tonggak sejarah baru bagi kekuatan regional kedua negara. Meskipun kedua negara memiliki perbedaan dalam hal pandangan politik, ekonomi maupun kebudayaan. Namun, kedua negara menyadari bahwa penting untuk menjaga hubungan diplomatik, melakukan interaksi ekonomi dan memanfaatkan peluang guna memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, dengan adanya kerangka kerja sama kemitraan ekonomi komprehensif IA-CEPA, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- a. Menciptakan kawasan regional kedua negara khususnya Asia Pasifik untuk saling bekerja sama dengan mendukung adanya pertumbuhan ekonomi dan keamanan wilayah regional.
- b. Membentuk kerja sama kemitraan melalui beberapa sektor pengembangan seperti perdagangan, pariwisata, investasi yang memiliki tujuan untuk membangun stabilitas perekonomian keduanya.
- c. Membangun peluang investasi kedua negara khususnya dengan meningkatkan investasi Australia ke Indonesia membuat pasar perdagangan Indonesia memiliki jumlah investor dalam jangka panjang yang dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia.
- d. Memberikan teknologi maupun informasi terkait tersedianya peluang pasar global maupun memfasilitasi kedua negara untuk meningkatkan kapasitas ekonomi baik disektor pemerintah maupun swasta (IA-BPG Submission towards the IA-CEPA, Agustus, 2016).

2.5. Lini Masa Perjanjian IA-CEPA

Tahapan-tahapan perjanjian bebas bilateral (FTA), IA-CEPA menjadi kesempatan kedua negara untuk saling bekerja sama dalam membangun integrasi ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Proses perundingan kerja sama dalam kerangka IA-CEPA telah di inisiasi sejak tahun 2005 dan memulai proses perundingan pada tahun 2010. Terjadinya permasalahan terhadap kedua negara, sempat menghentikan sementara aktivitas perundingan dan memulainya kembali pada tahun 2016. Hal tersebut disadari bahwa perjanjian IA-CEPA sebagai pengkait hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berikut dibawah ini terdapat gambar lini masa pada masa awal pembentukan perjanjian IA-CEPA pada tahun 2005-2018.

Gambar 1 – Lini masa perundingan IA-CEPA tahun 2005-2018



Gambar 2.1 Perjalanan Perjanjian IA-CEPA (Ministry of Trade, 2016, pp. 1-11)

Hubungan Indonesia dan Australia diawali oleh Australia yang bersimpati terhadap upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Keduanya merupakan mitra strategis kuat yang saling menyadari bahwa penting untuk membangun sebuah kerja sama, khususnya untuk menggali potensi-potensi ekonomi. Pada tanggal 4 April 2005, Presiden RI dan Perdana Menteri Australia bersepakat untuk mendeklarasikan sebuah kerja sama kemitraan komprehensif atau disebut *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang merupakan sebuah persetujuan kerja sama dalam bentuk perjanjian bebas bilateral (FTA).

Pada tahun 2007, Indonesia-Australia melalui sektor pemerintahan maupun swasta melakukan studi kelayakan guna untuk mempelajari beberapa peluang, manfaat dan hasil dari kerja sama bilateral. Pelaksanaan studi kelayakan yang dilakukan Indonesia-Australia berlangsung hingga tahun 2009. Pelaksanaannya sendiri terdiri dari 3 (tiga) kali pertemuan, dalam skema pelaksanaan yang berlangsung selama dua tahun menemukan, adanya kemitraan perdagangan bebas bilateral (FTA) kedua negara merupakan sebuah potensi besar untuk memberikan manfaat serta hasil yang mumpuni terutama terhadap peningkatan perdagangan dan investasi.

2.5.1. Perkembangan Perundingan IA-CEPA

2.5.1.1. Tahun 2010-2013: Rezim Susilo Bambang Yudhoyono & Julia Gillard

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang secara geografis berdekatan, jika dicermati posisi kedua negara amat sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh luasnya bentang Samudera Hindia. Perjanjian bilateral IA-CEPA

mulai direalisasikan pada tanggal 2 November 2010 di Jakarta, tepatnya pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard. Pada tahun tersebut, PM Julia Gillard melakukan kunjungan ke Jakarta dan mengatakan bahwa hubungan kedua negara merupakan mitra penting dan strategis. Pada tahun yang sama, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pun melakukan kunjungan ke Australia, beliau menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara dapat memberikan dampak untuk memajukan kesejahteraan, perdamaian serta keamanan bagi wilayah kawasan (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2010).

Dengan melihat potensi kedua negara untuk membangun sebuah kemitraan yang memiliki tingkatan tinggi, dapat membawa suatu perubahan baik diantara Indonesia-Australia maupun di kancah perekonomian internasional. IA-CEPA diharapkan menjadi suatu interaksi bilateral dalam bentuk perjanjian yang mencakup adanya kesepakatan-kesepakatan seperti perdagangan barang, jasa, investasi, maupun *E-commerce* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019, p. 63). Diselenggarakannya pertemuan pertama perundingan IA-CEPA untuk menganalisis lebih lanjut, mengenai prinsip-prinsip maupun landasan utama terdapat didalam perundingan negosiasi IA-CEPA antara lain, yaitu:

- a) Kedua negara sepakat bahwa negosiasi yang terjalin merupakan sebuah upaya untuk memajukan dan menyejahterakan potensi ekonomi dan meningkatkan standar hidup jangka panjang.
- b) Negosiasi kedua negara dilakukan dengan asas-asas adil, positif dan perhatian.
- c) Kedua negara saling mempertimbangkan proses studi kelayakan yang dilakukan pada tahun 2009, mengenai *Indonesia-Australia Partnership*

Business Group Positon (IA-PBG) paper, maupun hasil-hasil yang dicapai dalam kesepakatan *Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA).

- d) Hadirnya perjanjian IA-CEPA sebagai kemitraan komprehensif tidak hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian, melainkan memiliki beberapa lingkup ataupun cakupan, yaitu:
- Kerja sama sektor ekonomi.
 - Perdagangan barang dan jasa.
 - Investasi.
 - Pendidikan.
 - Pariwisata.
 - Keamanan.
 - Isu-isu seperti lingkungan, ketenaga kerjaan, kelembagaan, prosedur dan penyelesaian sengketa.
- e) Hadirnya IA-CEPA memfasilitasi beberapa sektor seperti investasi, arus barang, mengurangi adanya hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif).
- f) Bersifat komitmen terhadap beberapa kerangka tujuan yang dilakukan pada tahap awal negosiasi.
- g) Dikarenakan perbedaan dari segi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, Australia lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia. IA-CEPA memiliki sifat yang fleksibel, kedua negara dapat lebih mudah untuk mempertimbangkan adanya isu-isu pembangunan IA-CEPA.
- h) IA-CEPA memiliki sifat komprehensif yaitu berusaha untuk mencapai hasil yang seimbang bagi kedua negara di seluruh bidang negosiasi,

termasuk konsisten terhadap perjanjian yang telah ditetapkan oleh WTO yang didalamnya termasuk GATT Pasal XXIV dan GATS Pasal V.

- i) Negosiasi ekonomi bilateral kedua negara dilakukan secara bersamaan dengan adanya negosiasi beserta ketentuan lainnya yang juga sama-sama memberikan masukan terhadap aspek lain.
- j) Kerangka IA-CEPA selalu dipantau secara ketat, khususnya terhadap hasil utama perjanjian, sehingga jika dapat beberapa kekeliruan dapat lebih mudah direvisi secara tanggap.
- k) IA-CEPA *Pre-Agreement Facility* (PAF) direalisasikan dengan tujuan sebagai pendukung adanya perundingan IA-CEPA. Tujuannya, antara lain sebagai sarana pendukung dana dalam setiap proses negosiasi kedua negara (Ministry of Trade, 2016, pp. 1-3).

2.5.1.2. Tahun 2013: Rezim Susilo Bambang Yudhoyono & Kevin Rudd

Pentingnya untuk mengembangkan ekonomi wilayah Asia Pasifik menjadi agenda salah satu agenda yang dimuat oleh Indonesia dan Australia. Setelah melewati studi perundingan tahap awal, perjanjian IA-CEPA putaran pertama ditandatangani pada tahun 2012. Penandatanganan perjanjian IA-CEPA pada tahapan ini diharapkan dapat menjadi sebuah momentum baru kemitraan strategis bagi kedua negara, dengan melakukan eksplorasi yang spesifik terutama dalam bidang ekonomi, dapat menjadi sebuah gesekan kerja sama bilateral yang berkelanjutan (Neil Dias, Maret 1982, pp. 292-293).

Perundingan kedua perjanjian IA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2013 Di Canberra, Australia. Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Kedua pihak negara mengatakan untuk saling bahu-membahu memberikan masukan mengenai perkembangan lanjutan kemitraan komprehensif perdagangan. Selain itu, perundingan tersebut guna meneliti lebih dalam mengenai strategi perdagangan kedua negara serta mempelajari berbagai hambatan yang dapat kemungkinan terjadi.

Kerangka kerja pada tahapan kedua IA-CEPA, secara khusus melanjutkan beberapa pertimbangan *position paper* berasal dari IA-BPG. Didalamnya tertulis bahwa, salah satu program kerja yang dilakukan kedua negara untuk melakukan kerja sama disektor pertanian. Hal tersebut dapat mengembangkan keterampilan tenaga kerja guna bersaing secara global (Ministry of Trade, 2018). Dalam kerangka IA-BPG, terdapat beberapa dialog-dialog pertemuan yang dilaksanakan oleh kedua pihak negara. Salah satunya bertujuan untuk memperkuat mekanisme IA-CEPA yaitu *Indonesia-Australia Dialogue (IAD)*.

Tujuan dibentuknya IAD untuk menjembatani forum-forum bagi kalangan swasta ataupun non-pemerintah seperti, akademisi, jurnalis, organisasi *civil society* dan para investor. Sebagai sarana memperkuat hubungan *people to people* yang menjadi dasar diberlakukannya kerja sama antar kedua negara yang terbukti meningkat. Sekitar 17.000 mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di berbagai perguruan tinggi Australia, hal serupa pun terjadi yaitu jumlah masyarakat Australia yang mengunjungi Indonesia. Secara jumlah meningkat dari kurun waktu kewaktu baik untuk tujuan pariwisata, bekerja maupun pendidikan.

Penandatanganan IA-CEPA, mencakup mengenai adanya pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, jika kedua negara melakukan kerja sama komprehensif, Indonesia mendapatkan pembelajaran khususnya terhadap pembangunan manusia. Selain itu, Australia memiliki kemampuan yang lebih maju dibidang ekonomi jika dibandingkan dengan Indonesia, menjadi sebuah manfaat serta acuan baru untuk mengembangkan daya saing perekonomian domestik. Kerangka IA-CEPA membahas mengenai isu-isu penyeludupan manusia serta *human trafficking*. Kedua negara bersepakat untuk menandatangani Traktat Lombok untuk mengentas isu-isu tersebut. Alasan kedua negara memiliki komitmen dalam Traktat Lombok salah satunya, dapat menangani dan mencegah terjadinya kejahatan lintas batas negara maupun sebuah upaya untuk memberantas adanya pergerakan terorisme (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2010).

2.5.1.3. Tahun 2013-2014: Rezim Susilo Bambang Yudhoyono & Tony abbott

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott tahun 2013.

Perundingan diberhentikan sementara, dikarenakan terjadinya dinamika politik antar kedua negara. Alasan kedua negara mengalami kerenggangan disebabkan oleh, terjadinya aksi para pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit menuju Australia, menyebabkan meluapnya para pencari suaka di Indonesia dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, adanya aksi Angkatan Laut Australia yang melakukan patroli guna mengusir para pencari suaka dari wilayah perairannya, menyebabkan Indonesia berlaku secara tegas kepada pemerintahan Australia.

Pasalnya, adanya operasi Angkatan Laut Australia, memasuki wilayah perairan Indonesia dan hal tersebut menjadi isu yang sangat sensitif. Selain itu adanya aksi penyadapan pihak Australia terhadap pemerintahan Indonesia ditahun

yang sama. Menyebabkan diberhentikannya sebagian kerja sama kedua negara, salah satunya kerja sama perundingan IA-CEPA yang saat itu memasuki putaran ke-3. Aksi penyadapan tersebut dilakukan pihak Australia terhadap Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya Ani Yudhoyono, Wakil Presiden RI beserta jajaran menteri lainnya.

2.5.1.4. Tahun 2014-2015: Rezim Joko Widodo dan Tony Abbott

Pada tahun 2014, terjadi perpindahan pemerintahan Indonesia yang semula dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemerintahan Joko Widodo. Setelah terjadi ketegangan politik pada akhir tahun 2013. Hubungan kedua negara mengalami kerenggangan kembali pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan PM Australia Tony Abbott. Terjadinya peristiwa eksekusi mati atau dengan sebutan *Duo Bali Nine*, peristiwa tersebut merupakan sebuah sejarah yang menggemparkan dunia internasional. Terjadinya pengeksekusian mati para pengedar narkoba asal Australia yang berjumlah sembilan orang, dimana para pengedar narkoba ditangkap oleh pihak kepolisian saat mereka berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Dengan situasi yang tidak terkontrol saat itu, mengakibatkan seluruh aktivitas terkait perundingan IA-CEPA dihentikan sementara waktu guna meminimalisir ketegangan yang terjadi. Namun pada akhirnya kedua negara memutuskan untuk kembali melanjutkan perundingan IA-CEPA yang sempat dihentikan. Perundingan kedua negara kembali diawali saat Perdana Menteri baru Australia, Malcolm Turnbull melakukan aktivitas kunjungan pertama kali ke Indonesia pada November

2015. Pada kunjungan tersebut, Malcolm mendinginkan situasi ketegangan kedua negara dengan melakukan pembahasan terkait aktivasi kembali perundingan IA-CEPA yang sempat terhenti. Selain itu, Malcolm pun membahas mengenai potensi-potensi utama yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian bagi kedua belah pihak (Department of Foreign Affairs and Trade Australia, 2016).

2.5.1.5. Tahun 2016-2018: Rezim Joko Widodo dan Malcolm Turnbull

Perjanjian kembali dimulai pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo beserta PM Australia Malcolm Turnbull pada tahun 2016. Terjadinya reaktivasi perundingan IA-CEPA menjadi sebuah landasan baru kedua negara untuk memulai kembali putaran perundingan ke-3 yang sempat terhentikan. Negosiasi kedua negara kembali dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 4 Mei tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perundingan tersebut, kedua pihak memiliki agenda utama yaitu menilik lebih jauh perkembangan *Early Outcomes* serta tiga cakupan utama IA-CEPA. Kedua negara membangun kelompok-kelompok atau *negotiating group* dengan tujuan meningkatkan beberapa sektor utama seperti, perkembangan perdagangan barang dan jasa serta investasi (Ministry of Trade, 2016, p. 27).

Dalam perundingan ketiga IA-CEPA, Indonesia-Australia menyepakati beberapa kerangka kerja serta menyelesaikan rancangan agenda di sektor perdagangan kurang dari 18 bulan. Sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara memiliki komitmen kuat guna menciptakan rasa saling percaya dalam memperluas pertukaran informasi maupun

data secara efektif. Khususnya untuk memenuhi kepentingan masing-masing dalam mewujudkan aturan maupun kesepakatan bagi kedua negara. Kedua negara pun bersepakat untuk merencanakan pola baru terkait *food innovation* yang terealisasi didalam *Food Safety Cooperation Forum* (FSCF).

Kerangka FSCF merupakan hasil kesepakatan kedua pihak khususnya Australia, pemerintah Australia memberikan Indonesia berupa sebuah kerangka kerja yang dapat memenuhi dan mengembangkan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) di pasar ekspor. Hal tersebut merupakan hasil keinginan dari pihak Australia, dimana Australia menjadi salah satu negara yang menerapkan standarisasi tinggi terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi. Selain itu, tujuan utama pengembangan kerangka kerja sama kedepannya diharapkan Indonesia dapat memiliki standar yang sangat tinggi terkait perlindungan dan pengelolaan keamanan pangan (Kementerian Pertanian RI, p. 1).

Perundingan keempat IA-CEPA kembali diselenggarakan, tepatnya pada tanggal 23-26 Agustus 2016 di Sydney, Australia. Kedua negara membahas mengenai beberapa isu-isu utama seperti, perdagangan barang atau *Trade in Service*, investasi, *E-commerce*, kebijakan persaingan atau *Competition Policy* serta ketentuan lembaga dan kerangka kerja *Institutional and Framework* (Eva Fitriani, 2016). Kedua negara membahas mengenai tujuan dan hasil utama (*early outcomes*) dalam perjanjian IA-CEPA, meliputi laporan yang tercantum dalam IA-BPG, kontrak kerja sama dibidang jasa keuangan antara pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak *Australian Centre for Financial Studies* (ACFS), kegiatan pembelajaran atau pendidikan, sumber pangan yang melibatkan *Indonesia Food Innovation Center* (IFIC) dengan Kemenristekdikti, obat-obatan atau sanitasi

maupun beberapa hasil peternakan meliputi daging sapi (Ministry of Trade, 2018, p. 11). Hasil utama lainnya, meliputi peningkatan terhadap sektor ekspor-impor barang dan jasa dengan tujuan membuka jalan bagi para pelaku usaha atau investor kedua negara untuk ikut serta selama perundingan berlangsung.

Pada putaran perundingan kelima perjanjian bilateral IA-CEPA, kembali dilaksanakan dan dihadiri oleh sebanyak 114 Delegasi asal Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian PUPR yaitu Ir. Kimron serta 38 Delegasi asal Australia. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober - 4 November 2016 di Hotel Papandayan, Bandung, Jawa Barat. Pada perundingan kali ini, beberapa perwakilan kedua negara hadir sebagai saksi utama berjalannya perjanjian kemitraan komprehensif. Beberapa delegasi asal Australia serta beberapa pihak berasal dari DFAT, kementerian perdagangan, pertanian, KOMINFO, pelatihan Industri pun turut hadir dalam perundingan kelima IA-CEPA.

Isu-isu utama yang dibahas berkaitan kuat dengan perjanjian sebelumnya seperti, *Trade in Goods, Custom Procedures, Rules of Origin, Financial Services, Professional Services, Telecommunication, Investment, Technical Barriers to Trade,, E-commerce, Competition Policy, Trade in Services, Trade Facilitation, Institutional and Framework Provisions, Sanitary and Phytosanitary* (Fitriani Eva, 2016). Kedua negara bersepakat untuk saling menyuarakan pendapat masing-masing serta menanamkan bahwa, kerja sama bilateral yang tertuang didalam kerangka IA-CEPA senantiasa demi kepentingan bersama.

Pada putaran keenam, ketujuh dan kedelapan IA-CEPA kembali diselenggarakan pada bulan Februari – Agustus 2017. Pada perundingan keenam,

kedua negara membahas mengenai perbaikan atau revisi kerangka tawaran terhadap pasar barang dan jasa. Kemudian pada putaran ketujuh IA-CEPA, Indonesia-Australia membahas mengenai perbaikan kerangka kerja terhadap akses pasar barang dan jasa serta kiat awal untuk mengakses pasar investasi. Sedangkan pada perundingan IA-CEPA kedelapan, kedua negara membahas mengenai perbaikan atau revisi kerangka kerja terhadap akses barang dan investasi. Pada hakikatnya, kedua negara mengadakan tiga putaran perundingan dengan memiliki pembahasan utama yakni, adanya perbaikan atau revisi mengenai kerangka kerja terhadap akses pasar barang, jasa dan investasi (DFAT, 2017).

Putaran perundingan kesembilan dan sepuluh kemitraan komprehensif ekonomi IA-CEPA kembali diselenggarakan pada bulan Oktober – November tahun 2017. Putaran kesembilan perundingan IA-CEPA, turut mendatangkan Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Enggartiasto Lukita, agenda tersebut membahas mengenai upaya-upaya penyelesaian terhadap negosiasi IA-CEPA. Selain itu, kedua negara kembali membahas mengenai hal yang serupa dengan perundingan sebelumnya yaitu kerangka perundingan barang, jasa, investasi, maupun kerja sama ekonomi serta ketentuan kelembagaan lainnya. Pada masa putaran perundingan kesepuluh IA-CEPA, merupakan hasil dari negosiasi perundingan kesembilan. Pada perundingan ini, kedua negara melakukan percepatan terhadap negosiasi IA-CEPA. Dengan demikian hal tersebut menyebabkan kedua pemimpin negara bertemu dan mempercepat adanya proses penyelesaian negosiasi pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada tahun 2017 (DFAT, 2017).

Pada perundingan kesebelas dan duabelas kerangka kerja IA-CEPA, kedua negara kembali menyelenggarakan pertemuan dibulan Desember 2017 - Juli 2018. Kedua negara membahas mengenai agenda prioritas utama Indonesia agar dapat mempertahankan komitmen terhadap pendidikan dan kesehatan kedua negara. Pada perputaran kedua belas, agenda kedua negara memasuki tahapan untuk menyepakati substansi dasar kerangka kerja IA-CEPA serta dapat kembali meninjau proses dari hasil penulisan teks hukum kedalam bahasa Inggris dan Indonesia sebagai bahasa resmi kedua negara (Kemendag, 2018).

Setelah menyelesaikan proses tahapan-tahapan negosiasi, Indonesia mengizinkan perusahaan asing memiliki 67% saham khususnya di bidang pendidikan. Hal tersebut hanya didapatkan oleh pihak Australia, tidak untuk negara lain. Penandatanganan kesepakatan IA-CEPA dilaksanakan pada 2 Agustus 2018 di Istana Negara Jakarta, kesepakatan kedua negara ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia sekaligus disaksikan oleh kedua pemimpin negara. Keduanya tercatat melakukan proses negosiasi hingga tahun 2018 sebanyak 12 kali dalam kurun waktu delapan tahun. Berikut terdapat tabel 6 adanya kegiatan kerja sama IA-CEPA pada tahun 2010-2018.

**Tabel 6 - Kegiatan perundingan kerja sama bilateral IA-CEPA
Tahun 2010-2018**

NO	Tahun	Keterangan
1.	2010	Munculnya kesepakatan antara Presiden RI dan Perdana Menteri Australia terhadap kerja sama bilateral IA-CEPA.
2.	2012	Perundingan tahap awal IA-CEPA dilaksanakan di Jakarta.
3.	2013	Perundingan tahap kedua IA-CEPA dilaksanakan di Canberra, Australia.
4.	2014 - 2015	Perundingan IA-CEPA diberhentikan sementara dikarenakan terjadinya ketegangan politik antara Indonesia dan Australia.
5.	Mei 2016	Perundingan bilateral ketiga IA-CEPA kembali direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo di Yogyakarta.
6.	Agustus 2016	Putaran Perundingan keempat IA-CEPA dilaksanakan di Sydney, Australia.
7.	November 2016	Perundingan kelima IA-CEPA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.
8.	Juli 2018	Perundingan putaran ke-12.
9.	Agustus 2018	Penandatanganan deklarasi penyelesaian IA-CEPA oleh kedua negara disaksikan oleh Presiden RI serta Perdana Menteri Australia di Istana Negara, Jakarta.

BAB III

APLIKASI KONSEP KERJA SAMA INTERNASIONAL

Saat ini, ekonomi global sedang dihadapkan terhadap tantangan perang dagang antar satu sama lain. Hal ini membuat negara-negara saling bergantung dan memiliki hubungan bilateral, sama halnya Indonesia dan Australia. Kerja sama sendiri dapat diartikan menjadi beberapa hal seperti melakukan perundingan, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah maupun membentuk suatu perjanjian yang adil terhadap semua pihak. Hal tersebut sebagai bentuk interaksi atau kerja sama antar pemerintah untuk menyelaraskan sebuah kepentingan-kepentingan.

Sesuai dengan konsep kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti bahwa kerja sama merupakan sebuah interaksi antar negara-negara yang saling berhubungan satu sama lain dengan membentuk pendekatan maupun berkerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah maupun mengadakan perundingan demi menghasilkan perjanjian-perjanjian antar kedua belah pihak (Holsti, 1988, p. 209). Dalam bab ini, penulis akan membahas dan mengaplikasikan konsep kerja sama internasional menurut Holsti untuk menjawab rumusan masalah, di mana kerja sama internasional bertujuan:

- A) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, dimana dengan melakukan kerja sama, maka suatu negara dapat mengurangi biaya yang harus dilakukan negara dalam memproduksi sebuah barang bagi kepentingan negaranya.
- B) Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

- C) Memperbaiki hubungan antar negara yang disebabkan oleh masalah-masalah internal yang dapat mengancam keamanan bersama.
- D) Mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang dapat memberi dampak terhadap negara lain (K.J. Holsti, 1995, pp. 362-363).

Holsti berpendapat bahwa, ada beberapa alasan mengapa negara-negara saling melakukan kerja sama dengan negara lain yaitu bertujuan, meningkatkan kinerja perekonomian negara, meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya, memperbaiki hubungan antar negara serta mengurangi dampak kerugian yang disebabkan negara lain.

Tabel 7 - Analisis penerapan konsep Kerja sama Internasional

No	Konsep	Aplikasi
1.	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, dimana dengan melakukan kerjasama, maka suatu negara dapat mengurangi biaya yang harus dilakukan dalam memproduksi sebuah barang bagi kepentingan negaranya.	Meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia-Australia.
2.	Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.	Meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya hubungan ekonomi luar negeri Indonesia-Australia.
3.	Memperbaiki hubungan antar negara yang disebabkan oleh masalah-masalah internal yang dapat mengancam keamanan bersama.	Menguatkan hubungan Indonesia-Australia dalam konteks keamanan kawasan melalui identifikasi masalah domestik.
4.	Mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang dapat memberi dampak terhadap negara lain.	Melakukan mitigasi terhadap potensi konflik politik Indonesia-Australia.

Sumber: (K.J. Holsti, 1995, pp. 362-363)

3.1 Meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia merupakan dua negara dengan kondisi geografis saling berdekatan membuat keduanya melakukan kerja sama untuk saling memenuhi kepentingan masing – masing negara. Mempunyai ikatan sejarah yang dalam serta visi serupa yaitu memiliki kawasan makmur dan damai menjadikan Indonesia dan Australia mitra kerjasama perdagangan kuat diwilayah Asia Pasifik. Hubungan bilateral kedua negara telah terjalin sejak berdirinya kantor kedutaan besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra pada 1971. Pada tahun 2005, Indonesia-Australia mengadakan pertemuan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* dengan maksud memperkuat fondasi kerja sama dua arah. Dalam pertemuan tersebut, Australia membantu memperbaiki infrastruktur pasca terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2005, dengan biaya sebesar 45 milyar rupiah (Kedutaan Besar Indonesia di Australia, 2009). Meski hubungan keduanya menempati titik strategis, akan selalu ada masa dimana kedua negara perlu mempertahankan ikatan yang kuat serta menciptakan kerangka kerja baru untuk menopang hubungan erat kedua negara.

Secara harfiah, neraca perdagangan Indonesia dan Australia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari data bab 2 yang peneliti paparkan, perdagangan kedua negara selalu ditopang oleh adanya ekspor migas dibandingkan non migas, sehingga kontribusi surplus selalu didapatkan dari ekspor migas. Penurunan ekspor jauh lebih meningkat dibandingkan penurunan impor dari kedua negara menyebabkan defisit neraca perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 8 Neraca Perdagangan Indonesia dan Australia tahun 2010-2018.

Tabel 8 - Neraca perdagangan Indonesia – Australia 2010-2018

*) dalam juta US\$

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total perdagangan	7.453	10.760	10.203	9.409	10.595	8.518	8.469	8.533	8.645
Neraca perdagangan	60	405	-392	-668	-699	-1.113	-2.051	-3.484	3.005
Ekspor	3.756	5.582	4.905	4.370	4.948	3.702	3.208	2.524	2.819
Migas	1.613	2.504	1.547	1.397	1.251	707	538	582	656
Non migas	2.142	3.078	3.358	2.973	3.696	2.994	2.670	1.941	2.162
Impor	3.696	5.177	5.297	5.038	5.647	4.815	5.260	6.008	5.825
Migas	5.845	3	219	209	156.	143	731	964	664
Non migas	3.690	5.174	5.078	4.829	5.490	4.672	4.529	5.043	5.160

Sumber: (BPS, 2021) *Biro Pusat Statistik (diolah oleh PUSDATA Kemendag)*

Terjadinya penurunan atau defisit yang semakin meningkat terhadap perdagangan Indonesia-Australia dari tahun ke tahun, menyebabkan kedua negara memanfaatkan momentum tersebut untuk kembali meningkatkan keefektivitasan perdagangannya dengan Australia. Mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan dengan Australia, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam kerangka IA-CEPA. Salah satu penyebab neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit, diantaranya yaitu: kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan bebas tarif Indonesia dan Australia telah direalisasikan pada kerja sama perdagangan bebas kerangka kerja AANZFTA sebesar 96% fasilitas. Sedangkan dalam kerangka negosiasi IA-CEPA, Indonesia mendapatkan fasilitas bebas tarif sebanyak 99.9% dari Australia (Kemendag, 2018).

Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia mempersiapkan produk utama dalam negeri yang akan mendorong ekspor dengan Australia yaitu, produk otomotif khususnya mobil listrik dan hibrid yang dinilai telah memenuhi persyaratan (Kemlu, 2019). Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan

terhadap perekonomian Indonesia terutama terhadap industri otomotif domestik serta meningkatkan daya saing ekspor baik di Australia maupun dunia global. Pemanfaatan peluang lainnya yang dapat meningkatkan volume perekonomian kedua negara yaitu meningkatkan intensitas perdagangan, khususnya sektor impor dari Australia. Adanya pengoptimalisasian impor terhadap produk lanjutan dinilai akan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data bab 2 yang peneliti paparkan, mayoritas produk impor Indonesia dari Australia merupakan hasil bahan baku pemasok industri seperti bahan baku, gandum sebesar 524,6 juta US\$, hewan ternak sebesar 474,7 juta US\$, daging sapi beku sebesar 318,7, kapas sebesar 15,5 juta US\$ dan susu sebesar 113,9 juta US\$ (Trade Map, Australia, 2021).

Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki banyak penduduk serta berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pesat yang terjadi di Tiongkok menyebabkan negara tersebut sangat bergantung terhadap negara lain, terlebih dalam bidang energi. Melesatnya perkembangan industri di Tiongkok menyebabkan negara tersebut harus mendapatkan kebutuhan energi lebih, terutama dalam sektor minyak bumi. Nigeria merupakan sebuah negara yang letaknya di belahan Afrika Barat, menjadi salah satu negara dengan produsen minyak bumi terbesar keenam di dunia serta memiliki minyak berkualitas tinggi. Hal itu membuat pemerintahan Tiongkok ingin menjalin kerja sama untuk mencapai kepentingan negaranya.

Pada tahun 2000-2005, diketahui ekspor Nigeria ke Tiongkok didominasi oleh adanya sektor minyak bumi mencapai sekitar 95%, sedangkan komoditas ekspor Nigeria dari Tiongkok lebih bervariasi seperti, kendaraan dan reaktor nuklir, peralatan mesin listrik, mesin boiler maupun peralatan mekanis bersamaan

menyumbang lebih dari 50% (Fransisca, 2018, p. 46). Kerja sama bilateral kedua negara dinilai sangat penting bagi Tiongkok guna menunjang perkembangan industrialisasi serta proses produksinya agar dapat meningkatkan devisa negara. Penulis disini ingin menjelaskan bahwa Tiongkok dan Nigeria berkerja sama dalam berbagai proses memiliki sifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya proses sektor impor yang dilakukan oleh kedua negara dapat menjalankan perputaran ekonomi, terutama bagi Tiongkok untuk memajukan sektor industrialisasi maupun dalam memenuhi kepentingan nasional dan mempertahankan kedudukannya di dunia internasional.

Adanya pengoptimalisasi terhadap pengelolaan lebih lanjut terhadap produk impor Indonesia dari Australia tentu dapat membuahkan hasil yang optimal jika dikelola dan diproduksi dengan baik untuk membuat produk olahan lanjutan atau biasa disebut dengan *outward-oriented industrialization policy and export promotion*. Hal tersebut tentu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi sumber kebutuhan dalam negeri, namun jika produksi suatu barang dapat memenuhi standar, tentu dapat bersaing di pasar global dan membentuk Indonesia sebagai *economic powerhouse* atau dalam konsep internasional sebagai sebuah negara industri yang dapat memproduksi barang maupun jasa. Dengan berbagai informasi dan teknologi yang didapatkan Indonesia dengan menyepakati kerangka IA-CEPA, tentu dapat meningkatkan hasil-hasil komoditas dalam negeri seperti sektor, perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian maupun perluasan akses pasar seperti yang tercantum dalam hasil dan manfaat kerangka IA-CEPA.

Sektor lainnya yang dapat menunjang peningkatan perekonomian negara adalah pembangunan manusia, dimana untuk mencapai suatu kemajuan negara,

pertumbuhan masyarakat merupakan sebuah fokus utama negara untuk mencapai kesejahteraan negara secara keseluruhan. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan negara melalui tersedianya lapangan pekerjaan. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga memiliki sifat timbal balik. Terciptanya mobilitas pembangunan manusia tentu dapat mempengaruhi ekonomi, karena jika tidak memiliki pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni, proses pembangunan ekonomi sebuah negara tidak akan memadai.

Dilaksanakannya perundingan Indonesia-Australia pada tahun 2010 dalam kerangka IA-CEPA pada masa Presiden SBY dan Perdana Menteri Julia Gillard, merupakan sebuah momentum bagi kedua negara untuk bersama-sama menyejahterakan, mengamankan serta memberikan standar hidup jangka panjang bagi kedua negara. Salah satunya dengan meningkatkan daya saing pekerja-pekerja Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan di abad ke-21 yaitu dengan sektor ekonomi digital dan jasa. Dalam pertemuan perundingan IA-CEPA tersebut, keuntungan yang didapatkan bagi Indonesia yakni adanya kebijakan *work and holiday visa* terhadap tenaga kerja Indonesia dalam rangka *transfer of know-how*, mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan maupun setiap individu yang melakukan kegiatan seperti liburan maupun pertukaran budaya. Kedua negara sepakat untuk memberikan kuota kurang lebih sebanyak 4.100 masyarakat dapat mengunjungi Australia dan akan mengalami kenaikan kuota sebanyak 5% setiap tahunnya (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2019). Kerja sama kedua negara merupakan sebuah bentuk erat *government to government* (antar pemerintah kedua negara) untuk senantiasa memperkokoh pondasi hubungan bilateral.

Instrumen penting lainnya untuk mengembangkan kinerja perekonomian Indonesia melalui kerangka IA-CEPA yaitu dengan memaksimalkan pengaruhnya dalam investasi. Hal tersebut tertuang dalam perundingan IA-CEPA pada masa Presiden RI Joko Widodo beserta perdana menteri Malcolm Turnbull pada putaran ke-3. Dibukanya keran investasi di Indonesia dapat menghasilkan keterlibatan pihak asing untuk menanamkan modal asingnya di dalam negeri yang akan meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah, terdapat perkembangan realisasi arus masuk FDI dari Australia ke Indonesia pada tahun 2010-2018.

Tabel 9 - Perkembangan realisasi investasi PMA dari Australia ke Indonesia tahun 2010-2018

No	Tahun	Proyek	Investasi (dalam juta US\$)
1.	2010	94	214.209,5
2.	2011	103	89.699,1
3.	2012	137	743.592,2
4.	2013	287	226.426,0
5.	2014	226	647.273,5
6.	2015	443	167.967,9
7.	2016	812	174.704,5
8.	2017	730	513.865,5
9.	2018	635	597.437,8

Sumber: (NSWI BKPM, 2021)

Tiongkok merupakan salah satu negara sasaran investasi bagi negara-negara industri besar dunia, seperti Amerika Utara, Uni Eropa bahkan beberapa negara-negara maju di kawasan Asia yang dikenal dengan sebutan *New Industrialized Countries* (NIC) seperti Korea Selatan, Jepang, Hong Kong dan Taiwan (Howell, Inc, 1993, p. 33). Mendukung adanya peran program tersebut, pemerintah Tiongkok sangat berperan penting dalam mengatur kebijakan ekonomi yang diterapkan di negaranya. Salah satu kebijakannya, dengan memberikan izin terhadap para

investor asing untuk mendirikan perusahaan di Tiongkok sekaligus dapat menyesuaikan hukum-hukum bagi pelaku investor yang ada. Hal tersebut tercatat dalam kerangka tujuan dan manfaat perjanjian IA-CEPA yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Perdana menteri Julia Gillard pada 2010.

Pada perundingan tersebut, kedua negara menyebutkan bahwa hasil dan manfaat utama perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif IA-CEPA berupa meningkatkan investasi kedua negara. Indonesia menjadi negara tujuan investor Australia sebaliknya, memudahkan investor Indonesia untuk menanamkan modalnya di Australia. Berjalannya iklim investasi dengan Australia merupakan sebuah bentuk dalam meningkatkan investasi domestik dan membawa peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan Singapura yang menduduki peringkat utama (World Bank, 2016).

Dalam negosiasi IA-CEPA, kesehatan maupun investasi di bidang pendidikan tinggi merupakan salah satu pembahasan utama dalam putaran negosiasi terakhir IA-CEPA (I Satchwell, 2017). Tujuan Indonesia dalam bidang pendidikan sendiri tercantum dalam UU no 12 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa, perguruan tinggi asing yang ingin membuka pendidikannya di Indonesia memiliki beberapa syarat utama yaitu pertama, institusi asing dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi domestik. Kedua, merekrut dan memperkerjakan tenaga kerja pendidik warga negara Indonesia.

Menurut data OECD, sekitar 16% penduduk Indonesia dengan usia 25-34 melaksanakan pendidikan perguruan tinggi dan hanya sekitar 1% mahasiswa

Indonesia yang mengenyam studi pendidikan tinggi ke luar negeri (OECD, 2019). peraturan UU yang berlaku di Indonesia bahwa, investasi asing di bidang pendidikan hanya dapat dimiliki sebanyak 49%. Dilain sisi, Australia menginginkan lebih terkait investasi tersebut. Adanya pertimbangan beberapa faktor diatas, melalui kemitraan perdagangan IA-CEPA. Indonesia menawarkan kepada Australia berupa saham investasi asing di bidang pendidikan tinggi sebesar 67% masuk ke dalam daftar investasi terbuka asing.

Tujuannya agar Indonesia dapat meningkatkan momentum *education powerhouse* dan senantiasa meningkatkan mutu maupun pelayanan pendidikan tinggi di Indonesia. Dibukanya institusi asing di Indonesia dapat memperbesar potensi pasar universitas lokal terhadap mahasiswa asing maupun membangun sektor ekonomi dan pendidikan di tanah air. Selain itu, Indonesia dapat memaksimalkan peran investasi asing guna membangun sumber daya manusia yang kompeten serta memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi Australia dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut pun bertujuan untuk mempromosikan adanya kebijakan pendidikan yang ada di Australia sehingga para pelajar Indonesia tertarik untuk melanjutkan studinya di Australia.

Hambatan utama menjadi penyebab utama sektor investasi Indonesia melemah dari tahun ke tahun yaitu, tidak adanya pengaturan resmi mengenai hukum yang tegas terhadap jaminan keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut menjadikan minimnya para investor yang masuk ke wilayah domestik Indonesia untuk melakukan kegiatan investasi. Maka dari itu, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur serta kinerja perekonomian negara diperlukan adanya hukum memadai, yang menjamin

para investor dapat menanamkan modalnya dengan aman. Melalui kerangka IA-CEPA, kedua negara menyetujui untuk membahas mengenai adanya jaminan keamanan bagi para investor agar dapat menanamkan modalnya di negara masing-masing.

Dalam bidang kesehatan sendiri, melalui kerja sama IA-CEPA kedua negara bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dengan menyusun kurikulum pendidikan dokter spesialis dan perawat di Indonesia maupun Australia. Selain itu, kedua negara menyepakati untuk mendorong arus investasi bagi industri farmasi dan alat kesehatan guna mencapai target kedua negara yaitu melakukan Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia menuju ketersediaan secara mandiri terhadap bidang kesehatan (Ministry of Health Republic of Indonesia, 2020).

Selain itu, kerja sama kerangka perundingan IA-CEPA bagi Australia sendiri yaitu adanya peluang investasi di Indonesia dapat membantu Australia mencapai potensi ekonominya dengan adanya ketersediaan modal untuk membiayai industri baru dan meningkatkan industry yang ada. Adanya pertumbuhan yang didukung oleh investasi investasi asing dapat membayar dividen terhadap masyarakat Australia dengan meningkatkan pendapatan terhadap pajak khususnya kepada pemerintah federal dan negara bagian. Sektor lainnya yang menjadikan kedua negara merupakan sebuah mitra kerja sama strategis yaitu, Australia dapat membuka peluang ekspor tambahan guna meningkatkan kinerja perekonomian negaranya. Hal tersebut pun menjadi salah satu penunjang adanya kompetisi dan peningkatan inovasi dengan menciptakan sebuah teknologi dan layanan-layanan terbaru ke pasar Australia (Ministry of Trade, 2018).

3.2 Meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya hubungan ekonomi luar negeri Indonesia-Australia

Pada tahun 1980-an, Indonesia memiliki kebijakan mengenai perdagangan yang bersifat protektif. Adanya penerapan tarif yang tinggi terhadap sektor ekspor-impor perusahaan domestik serta dilakukannya pembatasan terhadap pengaruh swasta maupun pelaku usaha tertentu dalam kegiatan perekonomian. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan industri 4.0 memberikan dampak besar bagi perdagangan internasional Indonesia dan mengakhiri kebijakan protektif tersebut. Munculnya deregulasi perdagangan merupakan salah satu solusi bagi pihak swasta untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian. Menjadi salah satu acuan khusus untuk dapat senantiasa meningkatkan efisiensi terhadap perekonomian global serta mengatasi hambatan-hambatan seperti kebijakan tarif dan non-tarif.

Peningkatan efisiensi sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu cara negara dalam mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja serta biaya secara efektif (Fransiscus X, 2005, p. 157). Meningkatkan efisiensi dapat diartikan sebuah keadaan untuk memperoleh sebuah manfaat diperlukan pengorbanan sekecil-kecil mungkin. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien, jika hasil yang dilakukan tercapai dengan usaha yang minimum. Holsti berpendapat bahwa salah satu alasan negara melakukan kerja sama untuk meningkatkan efisiensi dibidang perdagangan dan mengurangi biaya masuk (K.J. Holsti, 1995, pp. 362-363). Sedangkan pengurangan biaya sendiri dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai sebuah negara yaitu memperoleh laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya.

Untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, sebuah negara harus menghapus biaya hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tarif merupakan hambatan terhadap perdagangan internasional yang dibebankan pada bea masuk (pajak) *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara (Wahono Phayana, 2018). Sedangkan hambatan non-tarif merupakan sebuah bentuk hambatan perdagangan dengan bentuk selain tarif seperti kuota, pungutan, embargo, sanksi maupun pembatasan lainnya. Tujuan hambatan non-tarif guna mengontrol adanya jumlah perdagangan yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain. Kedua hal tersebut tentu dapat menciptakan kerugian dan kehilangan atas pendapatan karena tidak memaksimalkan fungsi pasar dengan sebaik-baiknya serta menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi (Rizki Maryansyah, 2018, pp. 38-39).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia guna meningkatkan komoditas ekspor-impor migas dan non migas, namun seringkali menemui hambatan yang berkaitan dengan kebijakan tarif maupun non-tarif di negara mitra dagang Australia. Jika kedua negara menyepakati adanya perundingan IA-CEPA, salah satu agenda utama kedua negara ialah bersepakat untuk membebaskan tarif dan non-tarif dengan total 0%. Berikut terdapat tabel 10, 11 dan 12 mengenai target penghapusan tarif dan non-tarif dalam kerangka IA-CEPA tahun 2018.

Tabel 10 – Penghapusan tarif melalui kerangka IA-CEPA komoditas impor Australia ke Indonesia pada tahun 2018

Sektor Agrikultur

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Ternak hidup	0102.29.19	0%
2.	Daging sapi beku	0104.05.00	0%
3.	Daging domba	0104.10.00	0%
4.	Daging kambing	0104.20.00	0%

5.	Susu	0401	0%
6.	Yogurt	0403.10.00	0%
7.	Mentega	0405.10.00	0%
8.	Madu	0409.00.00	0%
9.	Kentang	0710.10.00	5%
10.	Wortel	076.10.10	0%
11.	Gandum	1001.11.00	0%
12.	Jelai	1003.10.00	0%
13.	Biji-bijian	1007.10.00	0%

*) Target penghapusan tarif pada tahun 2018

Sektor Manufaktur

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Baja	7205.21.00	0%
2.	Tembaga	2620.30.00	0%
3.	Mesin	4011.90.00	5%
4.	Plastik	3812.20.00	0%
5.	Elektronik	3818.00.00	0%
6.	Tekstil	3403.91	0%

*) Target penghapusan tarif pada tahun 2018

Sektor Sumber daya dan Energi

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Minyak bumi	3811.21	0%
2.	Batubara	2701.1	0%
3.	Besi dan baja	72	0%
4.	Bijih besi	2601.1	0%
5.	Aluminium	2606.00.00	0%
6.	Garam	2501.00.00	0%

Sumber: (DFAT, 2018)

Tabel 11 – Total penghapusan tarif melalui kerangka IA-CEPA komoditas ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2018

Sektor Agrikultur

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Ternak hidup	0102.21.00	0%
2.	Daging domba	0104.10	0%
3.	Daging kambing	0104.20	0%
4.	Madu	0409.00.00	3.75%
5.	Mentega	0405.10.00	0%
6.	Benih gula	1209.10.00	0%
7.	Bawang merah	2001.90.10	0%
8.	Tomat	2002.10.00	0%
9.	Coklat	0403.10.21	0%

10.	Minyak mentah (kelapa sawit)	1511.10.00	0%
10.	Pisang	0803.90.10	0%
11.	Jeruk	0805.10.20	0%
12.	Kopi	0901.11	0%
13.	Teh	09.02	0%
14.	Ikan	03.01	0%

*) Target Penghapusan tarif pada tahun 2018

Sektor Manufaktur

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Furniture kayu	3405.20.00	0%
2.	Emas	2843.30.00	0%
3.	Elektronik	3818.00.00	0%
4.	Kertas dan tisu	3307.90.30	0%
5.	Sepatu	64.04	0%
6.	tekstil	3403.91	0%

*) Target Penghapusan tarif pada tahun 2018

Sektor Sumber daya dan Energi

No	Komoditas	Kode HS	Target*
1.	Minyak bumi	3811.21	0%
2.	Bijih besi	26.01	0%
3.	Baja	2619.00.00	0%
4.	Batu bara (2)	2701.11.00	0%
5.	Karet	3812.10.00	0%

Sumber: (DFAT, 2018)

Tabel 12 – Penghapusan non-tarif melalui kerangka IA-CEPA

No	Deskripsi	Kebijakan	Sengketa dalam WTO
1.	Kemasan rokok polos Australia	Australia mengeluarkan aturan mengenai Pembungkus Tembakau Tobacco. Australia mewajibkan untuk mengubah kemasan dan penampilan produk tembakau dengan mengadopsi kemasan karton standar, menggunakan warna hijau zaitun atau Pantone 448C sesuai aturan.	Nomor: DS-467 Tahun pengajuan: 2013 Tahun selesai: 2018 Status: Dimenangkan pihak asal Australia (selesai).
2.	Sengketa produk kertas foto copy A4 atau <i>copy paper</i> terhadap Australia	Australia menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebanyak 33% kepada tiga produsen kertas asal Indonesia.	Nomor: DS-529 Tahun pengajuan: 2017 Tahun selesai: 2019 Status: Dimenangkan pihak asal Indonesia (selesai).

Sumber: (Jantarda Mauli, 2020) & (Trie Hoetamie Chahyaningroem, 2020)

Kerugian di sektor ekspor ditanggung oleh Indonesia apabila tidak mengaktifkan perundingan IA-CEPA guna mengurangi adanya hambatan

perdagangan (tarif dan non-tarif) dikarenakan tidak adanya sektor yang membantu peningkatan PDB Indonesia serta sulit masuknya produk-produk Indonesia di pasar Australia karena adanya penerapan tarif ekspor. Dalam pertemuan perundingan IA-CEPA pada tahun 2010-2013, kedua negara membahas mengenai prinsip-prinsip dan objektif IA-CEPA. Salah satu kebijakan perjanjian tersebut guna memfasilitasi adanya arus barang, investasi dan jasa. Dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif dan perihal batas yang dapat menghambat kerjasama. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia, pasalnya Australia telah memotong seluruh tarif yang mulanya sebesar 5% menjadi 0%.

Dalam hal ini, skema kerja sama NAFTA merupakan salah satu FTA yang berusaha untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan internasional, tujuannya untuk memudahkan negara-negara anggota untuk dapat memasuki pasar dengan menghapus bea masuk hambatan perdagangan. NAFTA merupakan organisasi multilateral regional, dimana kerjasama ekonomi perdagangannya terdiri dari beberapa negara yang berada di kawasan Amerika Utara. Tujuan NAFTA salah satunya untuk menciptakan perdagangan bebas sesama anggota, dengan menghapus hambatan perdagangan dan memfasilitasi aktivitas pergerakan lintas batas barang maupun jasa dalam perdagangan antara Kanada, AS dan Meksiko. Hambatan perdagangan tersebut dapat berupa hambatan tarif dan non-tarif. Dalam analisis ini penulis mengambil kasus terhadap pertumbuhan ekonomi Meksiko terhadap adanya NAFTA dalam hal pembebasan tarif dan non-tarif (Didiek Firgiawan, 2014, pp. 2-4).

NAFTA memiliki peran penting terhadap perekonomian Meksiko yang mencoba bangkit dari tekanan krisis yang melanda pada tahun 1994. Pada saat itu,

meksiko bersama negara-negara yang berada dalam kawasannya yaitu, Kanada dan Amerika Serikat melakukan liberalisasi perdagangan komprehensif. Salah satunya dengan meningkatkan sektor ekspor impor produk pertaniannya ke Amerika Serikat dan Kanada. Menurut data yang didapat bahwa NAFTA membawa sebuah perubahan signifikan terhadap bidang perdagangan, investasi dan pemberdayaan sumber daya manusia terhadap meksiko.

Terjadinya peningkatan komoditas ekspor Meksiko secara signifikan pada periode setelah terbentuknya NAFTA. Secara keseluruhan, NAFTA menyumbang sebanyak 30% dari PDB Meksiko setelah beberapa tahun terbentuk. Pada tahun 2006, sekitar 90% komoditas ekspor Meksiko dikirim ke AS dan Kanada, sedangkan dari komoditas impor menyumbang sebesar 55% dari kedua negara tersebut (Moreno J C & Napoles P R, 2005). Secara keseluruhan, perdagangan di antara negara-negara anggota meningkat mencapai tiga kali lipat dari tahun 1993 sampai 2007 dari US\$ 297 milyar menjadi US\$ 930 milyar.

Salah satu keuntungan Indonesia menyepakati kerangka IA-CEPA di sektor perdagangan dapat menjangkau pasar Australia seperti yang dilakukan oleh Meksiko sendiri, terlebih terhadap komoditas kelapa sawit. Pada perundingan IA-CEPA tahun 2016, Australia mengatakan akan menggantikan Indonesia sebagai pasar baru terhadap impor kelapa sawit menggantikan Malaysia. Komoditas kelapa sawit Australia sebelumnya sendiri ditopang oleh Malaysia sebesar 95% atau kurang lebih 130.000 ton total impor minyak kelapa sawit per tahun. Hal tersebut menjadi sebuah acuan bagi Indonesia untuk menyepakati kerangka kerja IA-CEPA. Pasalnya negara-negara pengeksport kelapa sawit Indonesia seperti India dan Eropa semakin sulit untuk meningkatkan volume terhadap ekspor kelapa sawit. Selain itu,

komoditas kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Pada tahun 2008-2014 ekspor kelapa sawit mengalami surplus jika dibandingkan dengan sektor komoditas lainnya yang mengalami defisit. Dimana adanya surplus dari komoditas kelapa sawit membantu neraca perdagangan sektor non-migas dan berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia.

Adanya penghapusan tarif bea masuk untuk sapi serta barang-barang manufaktur menjadi salah satu agenda yang tertuang dalam perundingan IA-CEPA pada putaran ke delapan yang berlangsung pada tanggal 31 Juli-4 Agustus 2017. Dengan adanya penghapusan tarif, kedua negara dapat meningkatkan peluang kerja sama terutama Indonesia. Peluang tersebut berupa peningkatan produk-produk Indonesia seperti produsen manufaktur seperti industri tekstil maupun furnitur sehingga dapat memenuhi standar serta dapat bersaing di pasar Australia.

Kerja sama ekspor impor daging sapi pun menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia dimana jumlah permintaan daging sapi dalam negeri jauh lebih tinggi. Sehingga untuk memenuhi jumlah permintaan daging sapi yang tinggi, Indonesia mengimpor daging sapi luar negeri yaitu berasal dari Australia. Sebanyak 90.06% sumber impor sapi hidup, 46.70% impor daging sapi dan jeroan berasal dari Australia (Chalib Thalib, 2008). Dengan adanya penghapusan tarif yang disepakati kedua negara, Indonesia mendapatkan kemudahan dari mengimpor daging sapi dengan harga yang lebih rendah dari sebelumnya mencapai 5% untuk 575 ribu ternak sapi pada tahun pertama, dinaikkan menjadi 4% setiap tahunnya mencapai 700 ribu ternak sapi. Untuk sektor daging beku yang semula mencapai 5% menjadi 2.5% dan akan dihapuskan 0% pada tahun kelima.

Penurunan tarif yang disepakati kedua negara dinilai memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan harga daging sapi yang lebih rendah. Penggabungan dua mitra kekuatan Indonesia dan Australia dapat menjadi sebuah konsep *economic powerhouse* untuk dapat menyasar pasar dunia global (Media Indonesia, 2021). Hal tersebut sama halnya dengan Australia, dimana dengan adanya pembebasan bea masuk ke Indonesia dapat menguntungkan dari sektor ekonomi Australia. Adanya pengiriman komoditas-komoditas agrikultur, manufaktur dan lain sebagainya, seperti gandum, minyak bumi, besi dan baja, batu bara dan sayur-sayuran ke Indonesia, sehingga produk-produk Australia dapat dijual dengan mudah di pasar Australia. Maka dari itu, akan membuka adanya peluang ekspor tambahan dengan tujuan tentunya meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Memperkuat hubungan Indonesia-Australia dalam konteks keamanan kawasan melalui identifikasi masalah domestik

Selain faktor ekonomi, keamanan wilayah kawasan menjadi salah satu fokus utama dalam menjalin kerja sama bilateral. Konteks keamanan dimaknai sebagai adanya kebutuhan utama untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan berbagai cara baik itu bidang ekonomi, politik, militer untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Menurut Holsi, interaksi kerja sama yang terjadi antar kedua negara secara langsung sedang menghadapi masalah atau memiliki kepentingan bersama (Holsti, 1988, p. 210). Indonesia dan Australia sendiri merupakan dua negara yang memiliki lokasi geografis yang strategis serta memiliki kepentingan bersama untuk

membentuk pondasi kokoh di berbagai sektor seperti keamanan, ekonomi, pendidikan, isu-isu transnasional dan sebagainya. Pembentukan kerja sama IA-CEPA merupakan sebuah bentuk adanya integrasi perekonomian dan keamanan Indonesia dan Australia secara bilateral maupun regional.

Adanya isu terkait terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional yang memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional. Isu ini tidak tergolong sebagai adanya fenomena baru, karena telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Terjadinya peristiwa serangan terorisme pada tanggal 11 September tahun 2001, terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat (US). Menyebabkan muncul pemahaman baru mengenai terorisme, merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan, dengan tujuan memberikan rasa takut bagi target utama sasarannya. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, isu terorisme marak diperbincangkan, khususnya terkait isu terorisme di Indonesia.

Maraknya berbagai peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia seperti terjadinya peristiwa Bom Bali I ditahun 2002 dan aksi pemboman pada tanggal 11 September 2004, di Kedutaan Besar Australia. Pasalnya, Australia sendiri merupakan salah satu korban dengan warga negara asing terbanyak pada peristiwa tersebut. Beberapa isu-isu yang terjadi dinilai menjadi sebuah penunjang utama kedua negara membahas kerangka negosiasi IA-CEPA. Melakukan kerja sama dimulai dengan adanya permasalahan hubungan Indonesia-Australia menjadi tolak ukur utama adanya pembuatan kebijakan keamanan dan pertahanan. Sebagai upaya komitmen erat kemitraan kedua negara dalam memelihara perdamaian dan kunci kerja sama praktis.

Maka dari itu, dalam kerangka kerja sama IA-CEPA kedua negara sepakat untuk membentuk adanya kerja sama terkait aparat keamanan dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi tindak kejahatan terorisme. Hal tersebut terbukti bahwa kedua negara melakukan adanya pelatihan-pelatihan angkatan militer serta meningkatkan kerja sama antar kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi adanya tindak kejahatan lintas negara (Ilham Arya, 2021, p. 4).

Adanya kerja sama keamanan melalui instrumen IA-CEPA, Australia dapat lebih mudah mengetahui informasi mengenai kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, sehingga Australia dapat berjaga-jaga untuk melawan aksi tersebut. Selain itu, dari segi teknologi dan finansial pemerintahan Australia jauh lebih maju serta dapat membantu pemerintahan Indonesia dalam memerangi terorisme domestik. Dalam kerangka IA-CEPA kedua negara pun bersepakat untuk meningkatkan kerja sama sektor maritim kedua negara untuk mengantisipasi adanya pergerakan kelompok terorisme melalui jalur perairan (Astari Marisa, 2020, p. 34).

Selain membahas mengenai isu terorisme, kedua negara pun sepakat untuk melakukan kerja sama terkait *cyber security*. Dalam pertemuan perundingan IA-CEPA, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan PM Malcolm turnbull. Australia mengirimkan Duta Besar Australia untuk Indonesia yaitu Paul Grigson untuk membahas mengenai keamanan siber. Kejahatan siber atau *cyber crime* adalah sebuah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan computer secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban tersebut. Singkatnya, kejahatan

siber merupakan sebuah tindakan ilegal yang didukung dengan teknologi komputer (Universitas Indonesia).

Dalam kerangka IA-CEPA kerja sama sektor keamanan, kedua negara sepakat untuk melakukan adanya pembahasan mengenai penyelesaian terkait isu keamanan siber. Keduanya memiliki tantangan yang sama untuk bersepakat meningkatkan kerja sama tersebut. Pasalnya, kejahatan siber ini tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga non-negara seperti peretas dan salah satu tindakan dari terorisme. Adanya tindak kejahatan siber ini semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi ancaman bagi kedua negara.

Adanya keamanan dengan tujuan berupaya untuk melindungi aset-aset perusahaan dan pengguna dari tindakan ilegal yang berusaha mengganggu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Hal tersebut tentu dapat merugikan sistem ekonomi suatu negara karena tindakan ilegal tersebut melakukan pencurian kekayaan intelektual seperti berkurangnya laba, kerugian nilai pasar dan sebagainya (CIPS, 2021). Oleh karena itu, kedua negara berkolaborasi dalam 2+2 dialog dan pertemuan *Ministerial Council on Law Security* dibawah kerangka kerja sama IA-CEPA untuk memperkuat kerja sama keamanan siber

3.4 Melakukan mitigasi terhadap potensi konflik politik Indonesia-Australia

Kerja sama internasional yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan maupun kepentingan negara-negara, salah satunya kerja sama bilateral. Kerja sama yang terbentuk atas dua negara dan persamaan kepentingan seperti, ekonomi, keamanan, perdagangan,

pendidikan, investasi, sosial maupun budaya. Secara lokasi geografis yang berdekatan, membuat Indonesia-Australia saling memiliki ketergantungan dan mendorong keduanya perlu berinteraksi untuk menjaga stabilitas kawasan.

Perbedaan kepentingan maupun terlibat oleh isu keamanan wilayah menjadi salah satu pergolakan hubungan Indonesia-Australia. Tidak dapat dipungkiri, salah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya keretakan hubungan kedua negara adalah isu pencari suaka. Permasalahan pencari suaka sendiri telah berlangsung sejak tahun 1996, pada masa pemerintahan John Howard hingga masa pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013. Permasalahan isu pencari suaka sendiri belum memiliki solusi terkait permasalahan tersebut. Secara harfiah, suaka sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap individu atau lebih, dimana alasan diberikannya perlindungan berdasarkan asas perikemanusiaan, agama, diskriminasi, politik dan sebagainya (Hamid Sulaiman, 2002). Secara rincinya, pencari suaka merupakan seseorang yang sedang mencari perlindungan di negara lain, namun status pengungsinya belum ditentukan oleh pihak *United Nations High Commissioner for Refugees* atau (UNHCR).

Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang berupaya memberikan adanya perlindungan internasional bagi para pengungsi ataupun pencari suaka. Hal tersebut menjadikan Australia sebagai sebuah negara dengan tujuan yang diminati bagi para pencari suaka. Beberapa anggapan yang terjadi di antara para pencari suaka, bahwa akan lebih mudah mendapatkan status pengungsi di Australia jika dibandingkan dengan negara lainnya dan menyebabkan mereka berusaha datang ke Australia

dengan berbagai cara. Beberapa diantara mereka datang dengan menggunakan kapal kayu secara illegal atau sebagai *boat people*.

Meluapnya tingkat pencari suaka ke negara tujuan Australia membuat negara tersebut harus bersikap tegas dengan melakukan pengetatan wilayah khususnya di perairan perbatasan. Masalah ini mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, pasalnya Indonesia merupakan negara transit bagi para pencari suaka menuju Australia. Setidaknya sekitar 13.829 jumlah pengungsi maupun pencari suaka di Indonesia dan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut memberikan dampak yang dapat mempengaruhi kondisi suatu negara baik secara ideologi, ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun keamanan nasional.

Pihak Australia sendiri cenderung menyalahkan posisi Indonesia yang tidak memiliki upaya-upaya pencegahan terhadap pencari suaka yang menuju Australia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa pemerintahan PM Tony Abbott yaitu dengan melakukan Operasi Perbatasan Kedaulatan. Tujuannya sebagai pencegahan masuknya para pencari suaka ke negara Australia, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Australia seperti melaksanakan adanya patroli Angkatan Laut di daerah perbatasan sebagai upaya pencegahan serta mendorong kembalinya para pencari suaka ke wilayah Indonesia (Adrini, 2014, p. 06). Namun, upaya tersebut justru mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Karena menurut klarifikasi, pihak Australia telah mencoba menerobos masuk kedalam wilayah perairan Indonesia sebanyak 6 kali dan menjadi isu sensitif bagi seluruh wilayah kedaulatan negara. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan Indonesia mengancam keras terjadinya pelanggaran wilayah maupun kebijakan tersebut.

Kebekuan kerja sama lainnya disebabkan oleh adanya aktivitas penyadapan yang terjadi tepatnya pada tahun 2014 oleh pemerintahan Australia terhadap pemerintahan Indonesia. Penyadapan tersebut dilayangkan oleh pihak Australia terhadap Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Istrinya beserta jajaran menteri. Penyadapan disini diartikan sebagai suatu kegiatan spionase dalam negara ataupun di dunia internasional untuk mengumpulkan data maupun informasi tertentu.

Salah satu keuntungan melakukan aksi penyadapan terhadap negara lain adalah guna mendapatkan informasi penting dari negara tersebut (Kristian H, 2013, p. 60). Beberapa kasus penyadapan yang pernah terjadi di dunia internasional antara lain, kasus penyadapan Uni Soviet terhadap Amerika pada tahun 1947-1991 ketika masa perang dingin. Ditemukan adanya sejumlah alat penyadap elektrik berbentuk mikrofon bernama Chrysostom ditempel pada sebuah pajangan tepatnya berada di kamar duta besar AS di Moskow.

Alasan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia mengatakan bahwa adanya potensi kebangkitan ekonomi Indonesia, yang terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya serta Indonesia berperan penting terhadap kebangkitan pasar regional di wilayah Asia Pasifik. Dengan demikian, hal itu menjadikan Australia merasa terancam akibat besarnya pengaruh perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Selain itu, dampak dari penyadapan tersebut berupa terjadinya penarikan terhadap duta besar Indonesia untuk Australia dari Canberra serta berkurangnya rasa percaya yang ditunjukkan Indonesia terhadap pemerintahan Australia. Tidak hanya itu, aksi tersebut menyebabkan diberhentikannya beberapa aktivitas kegiatan kedua negara antara lain seperti, kerja sama dalam pertukaran

informasi dan intelejen, kerja sama operasi militer yang bertujuan untuk memberantas penyeludupan manusia ke Australia, berhentinya latihan bersama TNI dan tentara kedua negara disemua kesatuan serta dihentikannya sementara perundingan IA-CEPA tahun 2014-2015.

Indonesia kemudian menghentikan beberapa kerja sama seperti *intelejen exchange* atau pertukaran informasi kedua negara dan negosiasi perundingan IA-CEPA. Akibat dari hasil ketegangan yang berlangsung, menyebabkan Presiden SBY meminta penjelasan secara tegas dan respon Australia terkait aksi penyadapan tersebut. Indonesia menyatakan secara tegas jika kerja sama kedua negara masih tetap ingin berjalan, maka Indonesia akan memberikan protokol untuk mengatur kembali kerja sama diberbagai sektor yang bersifat mengikat. Hal tersebut direspon positif oleh pemerintahan Australia, untuk melanjutkan dan memperbaiki kembali hubungan diplomatik kedua negara.

Terjadinya kesepakatan kedua negara terkait penandatanganan kerja sama keamanan intelijen atau *Code of Conduct* oleh masing-masing perwakilan menteri luar negeri Indonesia-Australia, menjadi sebuah langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembalikan hubungan kedua negara kembali ke tatanan dan proyeksi yang positif. Penandatanganan terhadap tata perilaku kerja sama keamanan atau *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* dilaksanakan tepatnya pada 28 Agustus 2014, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Nusa Dua, Bali. Dilaksanakannya penandatanganan tersebut, dapat membentuk sebuah pemulihan terhadap kerja sama bilateral kedua negara khususnya dalam bidang

intelejen, pemulihan terhadap komunikasi bilateral dengan tujuan mengembalikan *mutual understanding* dan mengembalikan rasa saling percaya kedua negara.

Tabel 13 – Lini kesepakatan *Code of Conduct on Framework for Security Indonesia - Australia*

No	Tahun	Identifikasi
1.	2013	Terjadi keretakan hubungan Indonesia-Australia terkait pencari suaka pada masa pemerintahan Presiden SBY dan PM Tony Abbott.
2.	November 2013	Indonesia memanggil pulang duta besar Indonesia dari Australia, Najib Riphath sebagai bentuk protes pemerintahan Indonesia.
3.	2014	Kebekuan hubungan Indonesia-Australia akibat aktivitas penyadapan yang dilakukan pihak Australia.
4.	Agustus 2014	Dilaksanakan penandatanganan kode etik atau <i>code of conduct</i> Indonesia-Australia.
5.	Oktober 2014	PM Tony Abbott menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo sebagai upaya menjalin kembali hubungan bilateral Indonesia-Australia.
6.	2018	Diadakan pertemuan bilateral di bidang keamanan untuk meningkatkan sektor <i>cyber security</i> .

Sumber: (DFAT, 2017)

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia pada akhirnya menyetujui adanya pengaktifan kembali perundingan IA-CEPA dengan memikirkan dampak yang didapatkan kedua negara. Australia pun menganggap demikian, Indonesia merupakan mitra penting dan strategis yang harus dijaga hubungannya, terlebih dalam isu pencari suaka. Keuntungan yang didapat berupa peluang untuk memperluas pengaruh ekonomi serta dapat menggali lebih banyak informasi dan bantuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun pertahanan. Dikarenakan dari segi pertumbuhan ekonomi, Australia cenderung lebih unggul dibandingkan Indonesia. Merupakan sebuah keistimewaan dalam status negara bertetangga, agar saling memiliki tujuan khusus dalam menghadapi berbagai tantangan khususnya mencapai terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Keduanya merupakan mitra perdagangan yang sudah terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Selain menjalin hubungan dengan anggota-anggota negara ASEAN, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang melibatkan pemerintahan Australia. Pada 2007, Indonesia melakukan pembahasan melalui *Joint Feasibility Study* yang melibatkan sejumlah pemerintahan, swasta maupun akademisi lainnya guna mengkaji beberapa peluang maupun hambatan kerja sama perekonomian kedua negara.

Perjanjian IA-CEPA merupakan tonggak sejarah baru bagi kedua negara dalam meningkatkan kemitraan ekonomi komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, pendidikan, investasi maupun ekonomi. IA-CEPA sendiri telah di inisiasi sejak April 2005, merupakan kerja sama turunan dari AANZFTA guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara jangka panjang. Melalui IA-CEPA, kedua negara menyepakati bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekedar FTA biasa, melainkan sebuah perjanjian ekonomi komprehensif yang memiliki cakupan luas dengan tujuan membentuk *economic powerhouse* untuk menyasar pasar di kawasan regional atau negara ketiga.

Tidak dapat dipungkiri, hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan sendiri tidak begitu harmonis dan kerap mengalami ketegangan. Beberapa isu-isu seperti terorisme, aksi penyadapan pihak Australia terhadap pemerintahan

Indonesia serta maraknya pencari suaka menuju Australia mempengaruhi hubungan kedua negara. Namun, keduanya menyadari bahwa, di tengah kemajuan globalisasi yang pesat serta memiliki latar belakang letak geografis yang berdekatan, membuat Indonesia-Australia melihat bahwa penting untuk senantiasa melakukan kerja sama dan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang.

Riset ini telah berupaya menjawab rumusan masalah mengapa pada akhirnya Indonesia menyepakati perundingan IA-CEPA tahun 2010-2018. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, riset ini telah menguraikan konteks studi kasus pada Bab II, di mana kerja sama yang dilakukan merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi kekuatan regional kedua negara, khususnya bagi Indonesia. Adanya kepentingan Indonesia dalam kerangka negosiasi IA-CEPA bertujuan untuk mengatasi permasalahan neraca perdagangannya dengan Australia dari tahun ke tahun yang selalu mengalami defisit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dan 8 perbandingan perdagangan Indonesia-Australia sebelum dan sesudah dilaksanakannya perundingan.

Dilaksanakannya perundingan IA-CEPA tidak hanya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan perdagangan. Namun, kerangka negosiasi IA-CEPA bertujuan untuk meningkatkan sektor pendidikan, pariwisata, investasi dua arah, kesehatan, keamanan, sumber daya manusia, memudahkan Indonesia mendapatkan akses terhadap komoditas bahan baku eksportir seperti minyak bumi, batu bara, besi, baja dan sebagainya. Adanya pengapusan tarif impor dengan total 0% serta dapat memperluas akses pasar Indonesia di dunia internasional. Jika pada kerja sama sebelumnya kedua negara sepakat untuk membebaskan tarif masuk barang dari Indonesia ke Australia dengan

mencapai 6% jumlahnya. Adanya mitra kerja sama IA-CEPA kedua negara sepakat untuk dapat membebaskan tarif dengan total 0% dengan tujuan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dalam jangka waktu lama.

Hal tersebut tertulis pada pembahasan awal kesepakatan IA-CEPA mengenai peluang-peluang yang didapatkan bagi pemerintahan Indonesia dengan adanya kerangka kerja sama negosiasi IA-CEPA. Dimana, kedua negara dapat menciptakan sebuah kawasan regional dengan membangun kerja sama dan mendukung kinerja perekonomian agar dapat bersaing secara global. Selain itu, peluang yang didapatkan bagi Indonesia lainnya yaitu dapat mengembangkan teknologi dan informasi terkait tersedianya peluang pasar domestik dan meningkatkan kapasitas ekonomi baik itu negara maupun swasta (IA-BPG Submission towards the IA-CEPA, Agustus, 2016).

Sementara itu, pada Bab III riset ini telah mengaplikasikan konsep kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Konsep tersebut menegaskan bahwa kerja sama internasional bertujuan. *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dengan melakukan kerja sama, maka suatu negara dapat mengurangi biaya yang harus dilakukan negara dalam memproduksi sebuah barang bagi kepentingan negaranya. Perjanjian kemitraan IA-CEPA, dinilai menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan perekonomian kedua negara terutama Indonesia. Memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia mempersiapkan produk utama dalam negeri yang akan mendorong ekspor dengan Australia, khususnya produk otomotif yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut menjadi momentum meningkatnya perekonomian Indonesia terutama dalam industri otomotif domestik. Pada sektor impor sendiri, Indonesia melakukan

pengoptimalisasian terhadap produk lanjutan. Selain guna memenuhi kebutuhan produk dalam negeri, produksi yang memenuhi standar internasional dapat meningkatkan ekspor Indonesia dalam kancah global atau menjadikan Indonesia sebagai *economic powerhouse*.

Sektor utama lainnya sebagai penunjang peningkatan perekonomian negara yaitu pembangunan sumber daya manusia, dalam kerangka IA-CEPA, pembangunan sumber manusia merupakan tujuan utama dibentuknya kemitraan, dimana dengan tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas maupun pendapat negara. Hal tersebut dibahas dalam perundingan Indonesia-Australia pada masa pemerintahan presiden SBY dan PM Julia Gillard, agenda utama keduanya yaitu dengan meningkatkan daya saing pekerja-pekerja, terutama Indonesia dengan memberikan *work and holiday visa* terhadap tenaga kerja Indonesia maupun mahasiswa maupun individu yang sedang melaksanakan liburan dan pertukaran budaya sebanyak 4.100 jiwa dan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya.

Investasi merupakan salah satu instrumen penting IA-CEPA memaksimalkan pengaruhnya dalam investasi. Dengan dibukanya keran investasi di Indonesia dapat meningkatkan devisa negara serta melibatkan pengaruh pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Khususnya dalam investasi di bidang pendidikan tinggi. Indonesia memberikan kebijakan terhadap Australia berupa saham investasi asing di bidang pendidikan tinggi sebesar 67%. Tujuannya yaitu sebagai memperbesar potensi pasar universitas lokal terhadap mahasiswa asing, memaksimalkan peran investasi asing guna membangun sumber daya manusia yang kompeten, memanfaatkan keberadaan Australia dalam melakukan transfer ilmu

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan momentum *education powerhouse* dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia

Kedua, meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Dalam hal ini terjadinya defisit terhadap neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun, menjadikan Indonesia memanfaatkan pengaruh kerangka kemitraan IA-CEPA. Salah satu kebijakan yang tertuang dalam perjanjian kedua negara adalah penghapusan tarif dan non-tarif. Kebijakan bebas tarif Indonesia dan Australia sendiri telah direalisasikan pada kerja sama perdagangan bebas AANZFTA sebesar 96%. Sedangkan dalam kerangka IA-CEPA, Indonesia mendapatkan fasilitas bebas tarif mencapai 99,9% dari Australia.

Dalam sektor ekspor-impor daging sapi, hal tersebut menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia, pasalnya Australia merupakan salah satu negara importir sapi terbesar kedua bagi Indonesia. Dengan adanya penghapusan tarif yang disepakati oleh kedua negara, akan memudahkan terutama terhadap pemerintahan Indonesia dalam mengimpor daging sapi dengan harga yang lebih rendah dari sebelumnya mencapai 5% untuk 575 ribu ternak sapi, menjadi 4% dengan total 700 ribu ternak sapi. Hal tersebut dinilai dapat berkontribusi besar terhadap Indonesia untuk bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dalam daging sapi serta dapat meningkatkan kualitas peternak sapi Indonesia untuk dapat bersaing dikancah global.

Ketiga, memperbaiki hubungan antar negara yang disebabkan oleh masalah-masalah internal yang dapat mengancam keamanan bersama. Selain faktor ekonomi, sektor keamanan merupakan salah satu pembahasan utama kemitraan

komprehensif IA-CEPA. Pasalnya, isu terorisme domestik yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah ancaman khusus bagi warga negara Australia yang sedang melakukan aktivitasnya di Indonesia. Maka dari itu melalui kerangka kemitraan IA-CEPA, Indonesia-Australia sepakat untuk bersama-sama memerangi isu terorisme sebagai upaya kerja sama praktis kedua negara dalam memelihara perdamaian kawasan, mempromosikan agenda hak asasi perempuan maupun isu *cyber security*. Selain itu, alasan Indonesia menyepakati adanya perundingan tersebut dari segi finansial maupun teknologi, dimana Australia jauh lebih maju dalam membantu pemerintahan Indonesia untuk memerangi kasus terorisme domestik dan mengantisipasi terjadinya penyerangan kelompok terorisme melalui jalur perairan.

Keempat, mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang dapat memberi dampak terhadap negara lain. Dalam hal ini, konflik yang terjadi terhadap Indonesia dan Australia seperti, isu pencari suaka maupun kasus penyadapan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak negara, menjadi salah satu tujuan utama dilaksanakannya kembali perundingan IA-CEPA. Adanya penghentian sementara perundingan IA-CEPA pada tahun 2014-2015. Akibat kedua dinamika tersebut, menyebabkan ketegangan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Perundingan IA-CEPA dinilai sebagai tolak ukur dilaksanakannya kembali hubungan kedua negara, pasalnya hal tersebut direspon positif oleh pemerintahan Australia dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama intelejen atau *code of conduct* oleh masing-masing perwakilan menteri luar negeri Indonesia maupun Australia.

Hal tersebut menjadi sebuah langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembalikan hubungan kedua negara ke proyeksi positif. Kedua negara juga

bersepakat untuk melakukan pemulihan terhadap komunikasi bilateral dengan tujuan mengembalikan *mutual understanding* dan rasa saling percaya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia pada akhirnya menyetujui adanya reaktivasi perundingan IA-CEPA dan memikirkan kembali dampak yang didapatkan bagi perekonomian apabila meratifikasi perundingan tersebut. Begitu pun dengan Australia, menganggap Indonesia sebagai mitra strategis yang penting untuk dijaga kelestarian hubungannya.

Perundingan terakhir IA-CEPA dilaksanakan pada tahun 2018, kedua negara menyelesaikan proses - proses perundingan dari tahun 2010-2018 sebanyak 12 kali. Indonesia-Australia pada akhirnya melakukan penandatanganan kesepakatan IA-CEPA yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2018, di Istana Negara, Jakarta. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018, kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya proses perundingan IA-CEPA secara substansial.

4.2.Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan informasi yang menghambat jalannya penelitian. Maka dari itu, peneliti akan merekomendasikan penelitian selanjutnya yang dapat memperbanyak literasi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Khususnya dalam kajian perundingan IA-CEPA yaitu:

1. Pembahasan akan dinilai meluas, jika dapat membahas mengenai kebijakan tarif dan non-tarif yang terdapat dalam kerangka IA-CEPA secara meluas khususnya dalam sektor agrikultur. Selain itu, pembahasan dilakukan secara meluas tidak hanya dalam sisi Indonesia, melainkan Australia.
2. Salah satu tujuan IA-CEPA untuk meningkatkan *global value chain* yang merupakan sebuah kolaborasi kekuatan ekonomi untuk memasok adanya kebutuhan global. Dimana Indonesia menjadi salah satu target utama dalam hal tersebut. Namun, penulis merekomendasikan tulisan mengenai dampak *global value chain* terhadap industri perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrini, P. (2014). Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia - Australia. *Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014*.
- Agung Banyu Perwita. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ahmed R T., & A.-A. (2013). *The Effect of Market Diversification Activities on Bangladesh RMG Export*. *International Journal of Economic and Financial Issues*.
- Astari Marisa. (2020). Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam Meratifikasi *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* tahun 2019. *Jurnal Transborders*. Vol. 4 No. 1.
- Badan Pusat Statistik. (04 Februari 2021). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <https://www.bps.go.id/#:~:text=BPS%3A%20270%2C20%20juta%20Penduduk,mewujudkan%20Satu%20Data%20Kependudukan%20Indonesia>.
- BBC. (2015). Dubes Australia untuk Indonesia kembali ke Jakarta. BBC.
- BPS. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015*.
- BPS. (2021). Biro Pusat Statistik. Pustaka KPI.
- Catley, B. &. (1998). *Australian Indonesian Relations Since 1945, The Garuda and The Kangaroo*. Aldershot: Ashgate.
- Chalib Thalib. (2008). *Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Christopher, D. (2003). *Networking The Region? The Emergence and Impact of*.
- CIPS. (2021). Ringkasan Kebijakan Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies.
- Danar A, S. (2019). Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia dalam Kerjasama IA-CEPA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, VOL. 13 NO. 1.
- Databoks. (6 Januari 2021). Kerja Sama IA-CEPA, Apa Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Australia? databoks.
- Department of Foreign Affairs and Trade Australia. (2016). *Fourth Round of Indonesia Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) Negotiations*. diakses melalui <https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yetin-force/iacepa/Pages/fourth-round-of-ia-cepa-negotiations.aspx>.
- DFAT. (2017). <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement>.
- DFAT. (2018). *Guide to using IA-CEPA to export or import*. [dfat.gov.au](https://www.dfat.gov.au).

- Didiek Firgiawan. (2014). Pengaruh Regulasi *North America Free Trade Area* (NAFTA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Meksiko ke Kanada dan Amerika Serikat 2004-2009. *Journal Fisip* Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- DPR RI. (2014). Efektivitas Kesepakatan *Code of Conduct* Indonesia - Australia. Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014.
- Eva Fitriani. (2016). IA-CEPA Segera Teken Kerja Sama Tenaga Kerja. *BeritaSatu*.
- Fitriani Eva. (2016). Indonesia Usulkan Kerja Sama Vokasional IA-CEPA. *Berita Satu*.
- Foreign Minister Australia. (2014).
- Fransisca, M. (2018). Kerja sama Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRC) - Nigeria Melalui Kerangka Forum On China - Africa Cooperation (FOCAC). Universitas Hasanuddin.
- Fransiscus X. (2005). Meningkatkan Efisiensi, Produktifitas dan Profitabilitas.
- Hamid Sulaiman. (2002). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harry Suetanto. (7 Maret 2011). *Head of the Agency For Trade Policy Analysis and Development Ministry of Trade*.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Howell, J. (Inc, 1993). *China Open It's Doors: The Politics of Economic Transition*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Humphrey Wangke. (2014). Efektivitas Kesepakatan *Code of Conduct* Indonesia-Australia. Vol.VI, No. 17/I/P3DI/September/2014.
- I Satchwell. (2017). *Australia-Indonesia trade deal: Dealing with great expectations*. Lowyinstitute.
- IA-BPG Submission towards the IA-CEPA. (Agustus, 2016). *Two Neighbours, Partners in Prosperity*. Indonesia Australia Business Council.
- Ilham Arya. (2021). Pengaruh kerja sama IA-CEPA bagi perekonomian Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Indonesia for Global Justice. (Juli 2019). Analisis Kritis Kerjasama Indonesia-Australia CEPA. IGJ, 1.
- Jantarda Mauli. (2020). Penyelesaian Sengketa Kebijakan Produk Kemasan Polos Produk Rokok Australia dalam WTO. *Law Review* Volume XX, No. 1 - Juli 2020.
- Jusuf. (2001). Future Relations between Indonesia and Australia. *The Indonesian Quarterly*.
- K.J Holsti. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.

- K.J. Holsti. (1995). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid I.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2010). *Pernyataan Bersama Indonesia-Australia* Jakarta, 2 November 2010.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (diakses pada tanggal 6 Januari 2021). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia*
<https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/trade.html>.
<https://indonesia.embassy.gov.au>.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (n.d.). *Hasil Utama Untuk Indonesia*.
- Kedutaan Besar Indonesia di Australia. (2009). *Bantuan Australia Untuk Aceh*. Kedutaan Besar Indonesia di Australia.
- Kemendag. (2018). *Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan*. Jakarta: Direktorat Perundingan Ditjen.
- Kemendag. (Maret, 2019). *IA-CEPA*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia.
- Kemendag. (Oktober, 2019). Jakarta: Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. *Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan*.
- Kementerian Keuangan. (2011). *Analisis Posisi Indonesia Terkait Free Trade Agreement Dengan Australia dan New Zealand*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- Kementerian Pertanian RI. (n.d.). *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures*.
<https://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>.
- Kementerian Pertanian. (September 2016). *Badan Karantina Pertanian Menjadi Tuan Rumah Workshop ISPM 31*. SPS Newsletter, Vol. 8, No. 3.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Barang RI Bebas Bea Masuk Australia*. Kemenperin RI.
- Kemlu. (2019). *Indonesia-Australia Masuki Babak Baru Hubungan Bilateral, Perjanjian Dagang IA-CEPA Ditandatangani*. Konsulat Republik Indonesia.
- Kristian H. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Lisbet. (2015). *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran*. Berkas DPR RI.
- M. Todaro & P. Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Makmur Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Mar'atus Sholihah. (2019). Strategi Indonesia untuk Mencapai Kesepakatan Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada tahun 2010-2018. *digilib.uinsby.ac.id*, 5.
- Media Indonesia. (2021). IA-CEPA jadi Solusi Lonjakan Harga Daging Sapi. Media Indonesia.
- Ministry of Health Republic of Indonesia. (2020). Kemenkes Dorong Pemanfaatan Implementasi Perjanjian Perdagangan Indonesia-Australia: UU 1 Tahun 2020. Kemenkes Republik Indonesia.
- Ministry of Trade. (2016). Analisis Strategi Posisi Runding Dalam Memperkuat Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Pustaka KPI, BPPP Kementerian Perdagangan.
- Ministry of Trade. (2018). *Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA*. Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI.
- Ministry of Trade. (2018). *FS-FQ of IA-CEPA*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Ministry of Trade. (2018). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Kementerian Perdagangan.
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moh. Nazir. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia, hal. 57.
- Moreno J C & Napoles P R. (2005). *NAFTA and the Mexican Economy: A Look Back on a Ten-Year Relationship*. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation.
- Neil Dias. (Maret 1982). *Prospects for Stronger Australia-Indonesia Economic Ties*. University of California Press.
- NSWI BKPM. (2021). *Invest in remarkable Indonesia*. NSWI.
- OECD. (2019).
- Pemerintah Australia,. (2013). Dokumen IA-CEPA Guiding Principles.
- Perth USAsia Centre. (June, 2016). *The Changing Architecture of the Asia-Pacific Trading System: Implications for the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. The University of Western Australia.
- Prof. Dr. Emzir. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Garfindo Perasada, hal. 2.
- Richard Chauvel. (2005). Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral. Granit.

- Rizki Maryansyah. (2018). Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Salvatore, D. (1997). Ekonomi Internasional. Edisi Kelima. Jilid I.
- Trade Map. (2017). Bilateral Trade Between Indonesia and Australia.
- Trade Map. (2021). *Trade statistics for international business development* . ITC.
- Trade Map, Australia. (2021). *Trade Statistics for International Business Development*. ITC.
- Trie Hoetamie Chahyaningroem. (2020). *Trade Dispute Indonesian A4 Paper Product Againsts Australia at the WTO*. JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli - Desember 2020.
- Triesanto Romulo. (2020). Peningkatan Penanggulangan Terorisme melalui Mekanisme Kerja sama Indonesia dan Australia Pada Era Joko Widodo. *Interdependence: Journal of International Studies*.
- UNHCR. (2017).
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2006). *FDI from developing and transition economies: Implication for development*. World Investment Report.
- Universitas Indonesia. (n.d.). Kejahatan Siber Meningkat di Masa Pandemi.
- Wahono Phayana. (2018). Hambatan Tarif dalam Bisnis Internasional. Slideshare.
- World Bank. (2016).
- World Bank. (n.d). GDP . world bank org.
- Yeti Andriani dan Andre. (Mei, 2017). Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia. *Andalas Journal of International Studies*, Vol 6 No 1.